

**STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MELALUI
LEVERAGING LEVEL KEBERLANJUTAN:
STUDI DI KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG**

(DISERTASI)

Oleh

CICIH DANI ASRI



**STRATA 3
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MELALUI
LEVERAGING LEVEL KEBERLANJUTAN:
STUDI DI KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

CICIH DANI ASRI

DISERTASI

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN**

pada

**Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**STRATA 3
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MELALUI *LEVERAGING LEVEL* KEBERLANJUTAN: STUDI DI KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG

Oleh

CICIH DANI ASRI

Pengembangan pariwisata memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk mengelola pariwisata dengan prinsip keberlanjutan yang mencakup dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu dengan mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan dalam sektor pariwisata, menganalisis hubungan antar dimensi keberlanjutan, dan merancang strategi yang tepat guna mendorong pertumbuhan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dan RAP-Tourism berbasis *Multi-Dimensional Scaling* (MDS). Metode ini memungkinkan penilaian mendalam terhadap dimensi keberlanjutan pariwisata di Kabupaten Pringsewu serta pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi sektor pariwisata. Data diperoleh melalui survei, wawancara dengan stakeholder, serta analisis dokumen perencanaan daerah. Selain itu, analisis *Leverage* digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan dalam tiap dimensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pringsewu secara umum berada pada kategori cukup berkelanjutan, dengan nilai indeks keberlanjutan rata-rata sebagai berikut: dimensi ekologi (72,13), ekonomi (67,41), sosial (54,37), kelembagaan (65,10), serta infrastruktur dan teknologi (67,57). Dimensi ekologi menunjukkan kinerja terbaik, sedangkan dimensi sosial memerlukan penguatan lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Kabupaten Pringsewu memiliki potensi besar untuk berkembang berkat keanekaragaman destinasi dan dukungan kebijakan

pemerintah, meskipun tantangan pada partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia masih perlu diatasi.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan adaptif, dengan fokus pada penguatan dimensi sosial dan kelembagaan, serta pemeliharaan kualitas ekologi dan infrastruktur. Kebijakan yang diusulkan mencakup pengembangan ekowisata, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi pariwisata, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pengembangan pariwisata berkelanjutan, *SWOT Analysis*, *RAP-Tourism*, Kebijakan wisata.

ABSTRACT

TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY THROUGH LEVERAGING SUSTAINABILITY LEVELS: A STUDY IN PRINGSEWU REGENCY, LAMPUNG PROVINCE

By

CICIH DANI ASRI

Tourism development has the potential to have both positive and negative impacts on the surrounding community and environment. Therefore, it is important to manage tourism with sustainability principles that encompass ecological, economic, social, institutional, and technological dimensions. This study aims to analyze and design a strategy for sustainable tourism development in Pringsewu Regency by integrating ecological, economic, social, institutional, and technological dimensions. The main objectives of this study are to realize sustainable management in the tourism sector, analyze the relationships between sustainability dimensions, and design appropriate strategies to encourage competitive and sustainable tourism growth. The methods used in this study are SWOT analysis and RAP-Tourism based on Multi-Dimensional Scaling (MDS). This method allows for an in-depth assessment of the dimensions of tourism sustainability in Pringsewu Regency and a mapping of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats facing the tourism sector. Data were obtained through surveys, stakeholder interviews, and analysis of regional planning documents. In addition, *Leverage* analysis was used to identify key factors influencing sustainability in each dimension. The research results indicate that tourism management in Pringsewu Regency is generally considered fairly sustainable, with average sustainability index values as follows: ecological (72.13), economic (67.41), social (54.37), institutional (65.10), and infrastructure and technology (67.57). The ecological dimension performed best, while the social dimension requires further strengthening. Based on the SWOT analysis, Pringsewu Regency has significant potential for development thanks to its diverse destinations and government policy support, although challenges related to community participation and human resource quality still need to be addressed. Sustainable tourism development in Pringsewu Regency requires an integrated and adaptive approach, focusing on strengthening the social and institutional dimensions, as well as maintaining ecological and infrastructure quality. Proposed policies include ecotourism development, human resource capacity building, tourism digitalization,

and strengthening collaboration between the government, community, and private sector to achieve sustainable tourism.

Keywords: Sustainable tourism development, SWOT analysis, RAP-Tourism, Tourism policy.

Judul Disertasiq : **STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA
MELALUI LEVERAGING LEVEL
KEBERLANJUTAN: STUDI DI KABUPATEN
PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Cicih Dani Asri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2030011009**

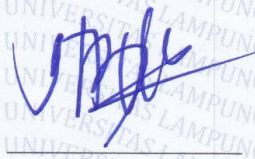
Jurusan : **Doktor Ilmu Lingkungan**

Fakultas : **Pascasarjana Multidisiplin**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

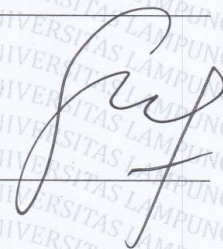
Prof. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
NIP. 196105051987031002



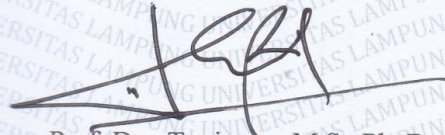
Prof. Dr. Drs. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si.
NIP. 196302061988031002



Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.
NIP. 196412231994031003



2. **Koordinator Studi Doktor Ilmu Lingkungan
Universitas Lampung**



Prof. Drs. Tugiyono, M.S., Ph. D
NIP. 196411191990031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

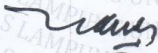
Promotor

: Prof. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.



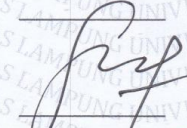
Co-Promotor 1

: Prof. Dr. Drs. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si.



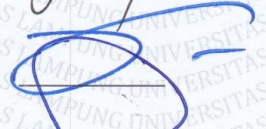
Co-Promotor 2

: Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.



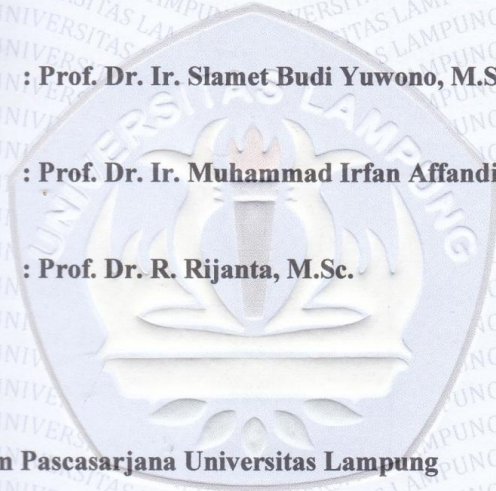
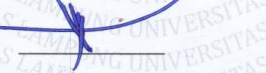
Penguji Internal

: Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.



Penguji Eksternal

: Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.



2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Disertasi: 6 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Disertasi dengan judul : **“STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MELALUI LEVERAGING LEVEL KEBERLANJUTAN: STUDI DI KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 6 April 2026
Yang membuat pernyataan,



CICIH DANI ASRI
NPM 2030011009

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ir.Cicih Daniasri, ST, M.Si., lahir di Kotabumi pada tanggal 04 Maret 1978. Penulis merupakan anak ke-3 dari pasangan alm. Suradan BE dan Hj. Sriyatun. Penulis menikah dengan Ir. Ayub Chairullah, ST. dan dikaruniai tiga orang anak perempuan, Alunna Hanive Chairunnisa, Shahia Nayyara Syandani dan Zea Kaneesha Alfathunnisa. Dalam riwayat pendidikan formal, penulis menempuh beberapa jenjang pendidikan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar di SD Kresna Bandung dan SD 1 Teladan Kotabumi, lulus tahun 1990
2. Sekolah Menengah Pertama di SLTP Negeri 5 Kotabumi, lulus tahun 1993
3. Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 2 Tanjung Karang, jurusan Fisika, lulus tahun 1996.
4. Pendidikan diploma (D3) Teknik Sipil, Universitas Lampung, lulus tahun 1999
5. Pendidikan Sarjana (S-1) di Jurusan Teknik Sipil, Universitas Lampung, lulus tahun 2005
6. Pendidikan Magister (S-2) di Program Magister Ilmu Lingkungan , Universitas Diponegoro, lulus tahun 2008.
7. Program Profesi Insinyur di Universitas Lampung, tahun 2023
8. Selain pendidikan formal, penulis juga aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, antara lain:
 1. Diklat PIM IV di Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Lampung, Angkatan I Tahun 2013
 2. Diklat PIM III di Pusat Pengembangan SDM Regional Yogyakarta, Angkatan I Tahun 2017

Dalam perjalanan kariernya sebagai aparatur sipil negara, penulis telah mengabdikan diri di bidang perencanaan Sejak tahun 2002, penulis memulai karier sebagai Staf

perencanaan, monitoring dan evaluasi di Inspektorat Lampung Utara , kemudian dipercaya menduduki berbagai jabatan struktural, di antaranya:

1. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu (2010-2017)
2. Kepala Bidang Perencanaaa, Pengendalian dan penelitian Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu (2017-2020)
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu (2020-2022)
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu (2022-2025)
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu (2025 s/d sekarang)

Atas dedikasi dan pengabdianya, penulis menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia. Saat ini penulis menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan pangkat Pembina TK.I/ IV b.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terimakasih dan kasih sayang kepada:

Keluarga

Ayahanda Suradan, BE (Alm) dan Ibunda Hj Sri Yatun
Suamiku Ir. Ayub Chairullah, ST

Anak anaku tersayang

Alunna Hanive Chairunnisa
Shahia Nayyara Syandani
Zea Kaneesha Alfathunnisa

Kakak dan adikku

Ari Daniasri, S.Si, MM, CFP
Biantara Suri, SST, M.Kes
Dina Daniasri, S.S

Para dosen dan civitas akademika

Yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi

Almamaterku

Universitas Lampung

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “***STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MELALUI LEVERAGING LEVEL KEBERLANJUTAN: STUDI DI KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG***” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada.

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku wakil Direktur Pascasarjana Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.
4. Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Wakil Direktur Bidang Umum Universitas Lampung
5. Drs. Tugiyono, M.S., Ph. D., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung yang telah memberikan masukan, saran dan kritik atas penyempurnaan penulisan Disertasi.
6. Prof. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., selaku Promotor utama penulis yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberikan saran, masukan, waktu, serta tenaganya dalam proses menyelesaikan disertasi ini.
7. Prof. Dr. Bambang Utoyo, S.Sos., M.Si., selaku Co-Promotor 1 yang telah memberikan arahan, nasihat, dukungan, serta motivasi dalam penulisan disertasi ini.

8. Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S., selaku Co-Promotor 2 yang telah memberikan arahan, nasihat, dukungan, serta motivasi dalam penulisan disertasi ini.
9. Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., selaku penguji internal yang memberikan arahan, masukan, saran membangun dalam menyempurnakan disertasi ini.
10. Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc, selaku penguji eksternal yang memberikan arahan, masukan, saran membangun dalam menyempurnakan disertasi ini.
11. Angkatan penulis Doktor Ilmu Lingkungan 2019.
12. Tim admin Doktor Ilmu Lingkungan dan Program Pascasarjana Universitas Lampung atas arahan, bantuan, dan segala macam keperluan penulis selama menjalani perkuliahan hingga wisuda penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis akan menerima saran dan kritik yang bersifat membangun agar disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Bandar Lampung, 6 April 2026
Penulis

Cicih Dani Asri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Kerangka Pemikiran.....	14
1.6. Novelty.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1. Risalah Teori Pembangunan Berkelanjutan	25
2.2. Lingkungan sebagai <i>Common pool resources</i>	27
2.3. Pariwisata	30
2.4. Pariwisata dalam Pembangunan Wilayah.....	31
2.5. Keberlanjutan Kepariwisata	35
2.6. Pariwisata Berkelanjutan.....	39
2.7. Keberlanjutan Ekologi, Sosial Budaya, Ekonomi, Kelembagaan dan Teknologi	43
2.7.1. Keberlanjutan Ekologi	43
2.7.2. Keberlanjutan Sosial-Budaya.....	44
2.7.3. Keberlanjutan Ekonomi	46
2.7.4. Keberlanjutan Kelembagaan	46
2.7.5. Keberlanjutan Teknologi.....	48
2.8. Strategi Pembangunan Berkelanjutan	49
2.9. RAPFISH (<i>Rapid Appraisal for Fisheries</i>)/MDS (<i>Multidimensional Scaling</i>).....	50

	Halaman
2.10. Perspektif Gender.....	52
2.11. Strategi Pengembangan Wisata	54
2.11.1. Konsep dan Tujuan Strategi Pengembangan Wisata	55
2.11.2. Kuesioner dan Wawancara sebagai Dasar Perumusan Strategi	55
2.11.3. Teori Pareto dalam Strategi Pengembangan Wisata.....	56
2.11.4. Formulasi Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Prioritas..	56
2.11.5. Evaluasi dan Keberlanjutan Strategi Pengembangan Wisata ...	57
2.12. SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>)	57
2.13. AHP (<i>Analytic Hierarchy Process</i>).....	59
2.14. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	61
III. METODE PENELITIAN	63
3.1. Tempat Penelitian	63
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.2.1. Teknik Penentuan Responden	66
3.3. Analisis Data	67
3.3.1. Analisis Persepsi Pengunjung dan Masyarakat	67
3.3.2. Analisis Kondisi Ekologi Pariwisata di Kabupaten Pringsewu.....	67
3.3.3. Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Wisata di Kabupaten Pringsewu	67
3.3.4. Strategi Pengelolaan secara Berkelanjutan.....	71
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
4.1. Karakteristik Responden Wisata Kabupaten Pringsewu.....	75
4.1.1. Karakteristik Pengunjung (Wisatawan)	75
4.1.2. Karakteristik Masyarakat Lokal.....	79
4.1.3. Karakteristik Pengelola Wisata.....	82
4.1.4. Karakteristik <i>Stakeholder</i>	85
4.2. Kondisi Ekologi Pariwisata Kabupaten Pringsewu	89
4.2.1. Karakteristik Topografi dan Kemiringan Lereng.....	90
4.2.2. Kondisi Elevasi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Wisata	90
4.2.3. Kondisi Hidrologi dan Arah Aliran Permukaan	92
4.2.4. Kelembaban Topografi dan Kesesuaian Pemanfaatan Lahan.....	92

	Halaman
4.2.5. Ketebalan Solum Tanah dan Daya Dukung Lingkungan.....	93
4.2.6. Implikasi Kondisi Ekologi terhadap Pariwisata Berkelanjutan	100
4.3. Kondisi Ekonomi Pariwisata Kabupaten Pringsewu.....	100
4.4. Kondisi Sosial- Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Pringsewu	105
4.5. Kondisi Infrastruktur dan Teknologi Pariwisata Kabupaten Pringsewu.	106
4.6. Analisis Keberlanjutan Pengembangan Wisata Kabupaten Pringsewu ..	113
4.6.1. Analisis Keberlanjutan Dimensi Ekologi.....	113
4.6.1.1. Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi	115
4.6.1.2. Analisis Monte Carlo Dimensi Ekologi.....	118
4.6.1.3. Analisis <i>Leverage</i> Keberlanjutan Dimensi Ekologi	120
4.6.2. Analisis Keberlanjutan Dimensi Ekonomi	122
4.6.2.1. Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi	123
4.6.2.2. Analisis Monte Carlo Dimensi Ekonomi.....	126
4.6.2.3. Analisis <i>Leverage</i> Keberlanjutan Dimensi Ekonomi	129
4.6.3. Analisis Keberlanjutan Dimensi Sosial.....	132
4.6.3.1. Status Keberlanjutan Dimensi Sosial	132
4.6.3.2. Analisis Monte Carlo Dimensi Sosial	134
4.6.3.3. Analisis <i>Leverage</i> Keberlanjutan Dimensi Sosial	137
4.6.4. Analisis Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan	139
4.6.4.1. Status Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan	139
4.6.4.2. Analisis Monte Carlo Dimensi Kelembagaan	142
4.6.4.3. Analisis <i>Leverage</i> Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan	144
4.6.5. Analisis Keberlanjutan Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	147
4.6.5.1. Status Keberlanjutan Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	147
4.6.5.2. Analisis Monte Carlo Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	149
4.6.5.3. Analisis <i>Leverage</i> Keberlanjutan Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	152
4.6.6. Kelayakan <i>Model Multidimensional Scaling</i> (MDS) dalam Analisis Keberlanjutan Pariwisata (RAP-Tourism)	153
4.6.7. Analisis Nilai Indeks dan Status Keberlanjutan Multidimensi ...	156
4.6.8. Faktor <i>Leverage</i> Multi Dimensi Keberlanjutan	165
4.7. Strategi Pengembangan Wisata Kabupaten Pringsewu	167

4.7.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Pengembangan Wisata Kabupaten Pringsewu	167
4.7.2. Faktor Internal.....	168
4.7.3. Faktor Eksternal	170
4.7.4. Matriks Internal Eksternal (IE)	171
4.7.5. Perumusan Alternatif Strategi dengan Matriks SWOT	173
4.7.6. Analisis Prioritas Strategi Menggunakan Metode AHP	177
4.7.7. Sinkronisasi Analisis IFE–EFE dan Prioritas Strategi AHP dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pringsewu	182
4.7.8. Rencana Strategi Kebijakan Pengembangan Wisata Kabupaten Pringsewu	184
4.8. Integrasi RAP- <i>Tourism</i> dan SWOT dalam Strategi Kebijakan Pengembangan Wisata Kabupaten Pringsewu.....	189
4.9. Integrasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dalam Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten Pringsewu	193
V. KESIMPULAN DAN SARAN	196
5.1. Kesimpulan	196
5.2. Saran.....	200
5.3. Rekomendasi	200
DAFTAR PUSTAKA	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bendungan Way Sekampung Kabupaten Pringsewu.....	2
2. Wisata Taman Ngoro Putri	6
3. Wisata Lanakila Lake.....	6
4. Wisata Princhsto	7
5. Agrowisata BMJ	9
6. Wisata Lembah Akasia.	10
7. Kerangka Pemikiran.....	16
8. <i>Network Visualization</i>	17
9. <i>Overlay Visualization</i>	18
10. <i>Density Visualization</i>	19
11. Peta Wilayah Kabupaten Pringsewu	63
12. Matriks Internal-Eksternal (IE).	73
13. Jenis Kelamin dan Rentang Usia Wisatawan.....	76
14. Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Wisatawan.....	77
15. Daerah Asal Wisatawan.....	77
16. Jenis Kelamin dan Usia Masyarakat	80
17. Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Masyarakat.....	81
18. Jenis Kelamin dan Usia Pengelola Wisata.....	83
19. Tingkat Pendidikan Pengelola Wisata.	80
20. Jenis Kelamin dan Usia <i>Stakeholder</i>	86
21. Tingkat Pendidikan <i>Stakeholder</i> dan Peran dalam Masyarakat.....	87
22. Peta Kemiringan Lahan Destinasi Wisata Kabupaten Pringsewu. ...	94
23. Peta Elevasi Terkoreksi Destinasi Wisata Kabupaten Pringsewu	95
24. Peta Akumulasi Airan Permukaan Destinasi Wisata Kabupaten Pringsewu.....	96

25. peta Arah Aliran Hidrologi Destinasi Wisata Kabupaten Pringsewu..	97
26. Peta Kelembaban Destinasi Wisata Kabupaten Pringsewu.	98
27. Peta Ketebalan Solum Tanah Destinasi Wisata Kabupaten Pringsewu	99
28. Kopi Produk UMKM peringsewu.....	101
29. Aneka Keripik UMKM Kabupaten Pringsewu.	102
30. Madu dan Gula Semut Produk UMKM.....	102
31. Kain Tapis Produk UMKM Kabupaten Pringsewu	103
32. Kain Batik dan Kain Perca Produk UMKM Kabupaten Pringsewu ...	104
33. Akses jalan Menuju Lokasi Agrowisata BMJ.....	107
34. Akses Jalan Menuju Lokasi Wisata Lembah Akasia	108
35. Akses Jalan Menuju Lokasi Wisata Princhsto.	109
36. Akses Jalan Menuju Lokasi Wisata Taman Ngoro Putri dan Lanakila Lake.....	110
37. Kecepatan Internet Provider Smartfren	111
38. Kecepatan Internet Provider 3 (Tri, Ooredoo Hutchinson).....	112
39. Kecepatan Internet Provider Telkomsel	113
40. Indeks Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi.	116
41. Hasil Analisis Monte-Carlo Dimensi Ekologi.	120
42. <i>Leverage</i> Dimensi Ekologi.....	121
43. Indeks Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi.	125
44. Hasil Analisis Monte-Carlo Dimensi Ekonomi.	127
45. <i>Leverage</i> Dimensi Ekonomi.....	133
46. Indeks Status Keberlanjutan Dimensi Sosial	133
47. Hasil Analisis Monte-Carlo Dimensi Sosial	136
48. <i>Leverage</i> Dimensi Sosial	137
49. Indeks Status Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan	141
50. Hasil Analisis Monte-Carlo Dimensi Kelembagaan.....	143
51. <i>Leverage</i> Dimensi Kelembagaan.	145
52. Indeks Status Keberlanjutan Dimensi Infrastruktur dan Teknologi.....	148
53. Hasil Analisis Monte-Carlo Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	151
54. <i>Leverage</i> Dimensi Infrastruktur dan Teknologi.....	152
55. Diagram Layang Nilai Multidimensi 5 Objek Wisata.	159

56. Diagram Layang Nilai Multidimensi Keberlanjutan Wisata di Kabupaten Pringsewu.	162
57. Posisi Strategi IE Wisata Kabupaten Pringsewu.....	173

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Summary Vos Viewer	19
2. Disertasi Tentang Wisata	23
3. Pergeseran Paradigma dan Strategi Pembangunan Kepariwisataaan ...	36
4. Data yang Dibutuhkan dalam Penelitian	65
5. Dimensi dan Atribut Keberlanjutan Wisata	69
6. Matriks SWOT	71
7. Karakteristik Responden Wisatawan pada Lima Destinasi Wisata di Kabupaten Pringsewu	75
8. Distribusi Karakteristik Demografi Masyarakat Lokal Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan di Kabupaten Pringsewu	79
9. Kategori status keberlanjutan berdasarkan hasil indeks RAP-Tourism	114
10. Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekologi	115
11. Analisis Monte Carlo Dimensi Ekologi	118
12. Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekonomi	123
13. Analisis Monte Carlo Dimensi Ekonomi	126
14. Indeks Keberlanjutan dimensi Sosial	132
15. Analisis Monte Carlo Dimensi Sosial	135
16. Indeks Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan	140
17. Analisis Monte Carlo Dimensi Kelembagaan.....	142
18. Indeks Keberlanjutan Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	147
19. Analisis Monte Carlo Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	150
20. Nilai stress dan R ² analisis RAP-Tourism	154
21. Nilai Indeks Keberlanjutan Wisata Kabupaten Pringsewu	155
22. Hasil uji korelasi	155
23. Faktor internal dan faktor eksternal Wisata Kabupaten Pringsewu.....	167

24. Matriks <i>Internal Factor Evaluation</i> (IFE)	169
25. Matriks <i>External Factor Evaluation</i> (EFE)	170
26. Hasil matriks SWOT Wisata Kabupaten Pringsewu	182
27. Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Utama	179
28. Matriks Normalisasi	179
29. Prioritas Global Strategi	179
30. Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Horizon Waktu	188
31. Kebijakan Pengembangan Wisata Kabupaten Pringsewu yang Mengintegrasikan Hasil Analisis SWOT dan RAP-Tourism.....	191

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi pariwisata secara global saat ini sedang menghadapi tantangan degradasi lingkungan, tumpang tindih dan konflik pemanfaatan sumberdaya serta kurangnya tata kelola yang berkelanjutan. Kondisi destinasi alam di negara-negara berkembang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan, pada negara berkembang wisata alam yang tersedia dituntut untuk menyediakan fasilitas yang tersedia pada wisata modern, nilai alami dari wisata alam itu sendiri mulai mengilang untuk memenuhi ekspektasi dan tuntutan konsumen, konsep wisata alam sangat jauh dari ekowisata yang menjaga kondisi alami lingkungan, dengan manusia yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan tanpa mengubah lingkungan tersebut. Penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan umumnya terjadi pada wilayah yang melakukan pembangunan infrastruktur skala besar, yang merupakan tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembangunan wilayah adalah konflik ekologi dan ekonomi yang berjalan berlawanan arah. Peningkatan ekonomi pada negara berkembang biasanya diawali dengan kondisi degradasi lingkungan ini ditandai dengan penurunan daya dukung lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, serta berkurangnya kualitas pengalaman wisata kondisi ini terjadi karena masa transisi yang tidak memperhatikan lingkungan hanya fokus dalam pembangunan. Berdasarkan kondisi yang terjadi memberikan gambaran bahwa keberhasilan pariwisata tidak dapat diukur hanya dari peningkatan jumlah kunjungan, tetapi harus dilihat secara sistematis bagaimana tingkat keberlanjutan lintas dimensi.

Kondisi pariwisata di Indonesia saat ini berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan adanya peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB dan adanya peningkatan penyedia lapangan pekerjaan

disektor terkait wisata, namun lain sisi adanya laporan dari Kementerian lingkungan hidup terkait degradasi lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan pada daerah kawasan wisata air dan lanskap buatan, adanya ketimpangan antara kualitas sumberdaya lingkungan yang mencerminkan masih lemahnya integrasi prinsip pembangunan dan pengembangan destinasi wisata.

Provinsi Lampung terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota. Salah satunya yaitu Kabupaten Pringsewu yang merepresentasikan kondisi ketimpangan ekonomi dan lingkungan yang terjadi. Data resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dari 119.073 orang pada tahun 2022 menjadi 274.302 orang pada tahun 2025. Peningkatan jumlah kunjungan disebabkan adanya berkembangnya destinasi wisata alam dan buatan di sekitar Bendungan Way Sekampung, seperti Lanakila Lake, Ratu Banyu, dan Lembah Akasia. Wilayah Kabupaten Pringsewu ini berpotensi untuk mendorong pembangunan daerah dan memberikan citra unik bagi pringsewu. (Rohaya, 2020) mengatakan bahwa sektor pariwisata memberikan efek berantai (multiplier effect) akan mendorong perekonomian masyarakat sekitar, sehingga memberikan distribusi pendapatan penduduk di daerah sekitar pariwisata. Selain itu, posisi geografis Pringsewu sebagai wilayah lintasan utama di Provinsi Lampung memperkuat perannya sebagai destinasi wisata singgah dan wisata keluarga. Namun, rata-rata lama kunjungan wisatawan yang masih berada pada kisaran 1,40 hari pada tahun 2025 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang optimal bagi masyarakat lokal. Kondisi ini mengindikasikan keterbatasan kualitas destinasi, integrasi ekonomi kreatif, serta keberlanjutan pengelolaan wisata.



Gambar 1. Bendungan Way Sekampung Kabupaten Pringsewu

Kondisi pariwisata Kabupaten Pringsewu berdasarkan data kunjungan dan lama tinggal menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan berlangsung konsisten, tetapi berbanding lurus dengan kedalaman manfaat ekonomi lokal. Data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu menunjukkan kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari 119.073 orang (2022) menjadi 175.593 (2023), 224.434 (2024), dan 274.302 orang (2025). Pada periode yang sama, wisatawan mancanegara mulai tercatat kembali, yaitu 3 orang (2023), 10 orang (2024), dan 23 orang (2025). Namun, rata-rata lama kunjungan wisata pada 2025 berada pada angka 1,40 hari (setelah sempat 2,00 hari pada 2024), yang mengindikasikan pola wisata singgah/pendek masih dominan.

Kondisi kunjungan wisata yang terjadi belum memberikan manfaat ekonomi secara signifikan bagi masyarakat lokal secara luas baru dirasakan oleh pelaku wisata secara langsung yang berperan aktif dalam pengelolaan wisata. Hal ini membutuhkan koordinasi dan integrasi multi *stakeholder* dan multi dimensi untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat baik yang berperan langsung maupun tidak langsung melalui *multiplier effect*.

Dari sisi tata kelola wilayah, Pringsewu memiliki peluang kuat sebagai destinasi “transit tourism” dan wisata keluarga karena posisinya berada pada lintasan utama di Provinsi Lampung. Tetapi, peluang ini perlu ditopang oleh perencanaan ruang yang tertib (zoning kawasan wisata, perlindungan area sensitif seperti sempadan badan air, dan pengendalian intensitas bangunan), serta pengelolaan prasarana dasar (air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan). Jika aspek tata kota/wilayah tidak diintegrasikan, kunjungan yang meningkat berpotensi memperbesar tekanan lingkungan dan menurunkan kenyamanan wisatawan—yang ujungnya membuat lama tinggal pendek dan belanja wisata terbatas.

Secara ekonomi, pengembangan pariwisata Pringsewu dilaporkan memberikan multiplier effect melalui tumbuhnya jasa, perhotelan, dan kuliner, serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan BUMDes.

Pola kunjungan wisata memiliki implikasi langsung terhadap kinerja ekonomi pelaku usaha lokal. Apabila wisatawan hanya melakukan kunjungan singkat (misalnya satu hari), penerimaan yang terbentuk umumnya terbatas pada komponen belanja dasar, seperti tiket masuk, parkir, serta konsumsi makanan dan minuman. Sebaliknya, ketika rata-rata lama tinggal meningkat (misalnya menjadi 2–3 hari), maka ragam transaksi ekonomi cenderung bertambah, mencakup pengeluaran untuk akomodasi, sewa transportasi, pembelian cendera mata/oleh-oleh, hingga partisipasi dalam aktivitas wisata lainnya. Dalam perspektif akuntansi, peningkatan jumlah dan variasi transaksi tersebut akan mendorong kenaikan pendapatan (omzet) usaha, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan laba apabila biaya operasional dapat dikelola secara efisien. Dampak ini juga dapat tercermin pada tingkat desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), misalnya dari kontribusi unit usaha BUMDes yang mengelola layanan parkir, tiket, atau penyewaan fasilitas. Dengan demikian, arah kebijakan pengembangan pariwisata tidak cukup berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi perlu menekankan peningkatan kualitas pengalaman wisata guna mendorong durasi tinggal dan belanja wisata yang lebih tinggi.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antargenerasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan. Kemunculan konsep ini berkaitan erat dengan kesadaran tentang tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dengan inti pada kepentingan ekonomi. Di Indonesia, pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sudah mulai merambah dan dijadikan acuan pembangunan di segala bidang (Hapsoro & Bangun, 2020).

Penelitian terdahulu periode 2020–2025 menunjukkan bahwa keberlanjutan pariwisata dipengaruhi oleh interaksi multidimensi. Pengembangan pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi menekankan pentingnya pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal secara adil dan berkelanjutan (Gupta et al., 2024). Secara sosial, kegiatan pariwisata harus menghormati nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat serta meningkatkan kualitas hidup. Sementara itu, dari sisi lingkungan,

pariwisata harus mampu meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan menjamin kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ketiga aspek ini perlu diintegrasikan secara harmonis dalam setiap tahap pengelolaan destinasi wisata. Peningkatan kunjungan wisata tanpa penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat cenderung menurunkan indeks keberlanjutan destinasi. Sebaliknya, studi Liu et al. (2023) menunjukkan bahwa destinasi yang mengadopsi pendekatan evaluasi keberlanjutan secara komprehensif mampu mencapai kinerja ekonomi dan sosial yang lebih stabil. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya celah penelitian, khususnya pada konteks daerah berkembang yang menggabungkan infrastruktur strategis nasional dengan wisata berbasis komunitas. Dinamika pengelolaan yang beragam ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan tata kelola kelembagaan. Namun, hingga saat ini, sebagian besar penelitian masih menganalisis dimensi keberlanjutan secara parsial, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana tingkat keberlanjutan lintas dimensi dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan strategi pengembangan wisata yang efektif.

Bendungan Way Sekampung mulai dibangun sejak September 2016 sedangkan pembebasan lahan dimulai pada tahun 2015. Pembebasan lahan meliputi lahan-lahan masyarakat berupa rumah, sawah, dan kebun masyarakat. Daerah Kecamatan Pagelaran ini dulunya adalah kawasan pertanian dan perkebunan yang mayoritas pemilik lahan merupakan petani atau pekebun. Dengan adanya pembangunan Bendungan Way Sekampung ini diperkirakan akan memberikan dampak pada kondisi lingkungan fisik serta kehidupan sosial ekonomi dan masyarakat. Ada 5 lokasi wisata yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu Wisata Taman Ngoro Putri, Wisata Lanakila Lake, Wisata Princhsto, Agrowisata BMJ (Bina Mandiri Jaya) dan Wisata Lembah Akasia.

Beberapa obyek wisata yang memanfaatkan keberadaan Bendungan Way Sekampung, diantaranya Wisata Taman Ngoro Putri, Wisata Lanakila Lake, dan lainnya.



Gambar 2. Objek Wisata Taman Nodoro Putri.





Gambar 3. Objek Wisata Lanakila Lake.

Pertumbuhan destinasi wisata di sekitar Bendungan Way Sekampung menunjukkan bahwa fungsi bendungan telah meluas melampaui sekadar pengendalian air dan banjir. Bendungan ini telah menjadi pusat pariwisata penerbangan dan alam, menarik banyak operator, termasuk individu dan kelompok penyuluhan pariwisata. Kabupaten Pringsewu memiliki beberapa objek wisata buatan manusia yang menawarkan pemandangan yang sama mengesankannya, selain memanfaatkan area sekitar Bendungan Way Sekampung sebagai destinasi wisata. Objek wisata tersebut antara lain Princhsto (Pternakan dan Restoran Pringsewu), Agrowisata BMJ (Bina Mandiri Jaya), dan Lembah Akasia . Princhsto (Pternakan dan Restoran Pringsewu), yang terletak di Pekon Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, adalah objek wisata buatan manusia yang dirancang untuk tujuan pendidikan. Objek wisata ini menawarkan kegiatan menunggang kuda, panahan, wisata alam, dan kesempatan memberi makan hewan. Princhsto kini menjadi objek wisata edukatif untuk semua usia, dari bayi hingga dewasa. Objek wisata ini sangat populer, terutama di akhir pekan, berkat harga tiket masuk yang rendah dan beragam atraksi yang ditawarkan.



Gambar 4. Wisata Princhsto.

Selain wisata alam ada wisata buatan yang menyajikan pemandangan pegunungan pesawaran dan persawahan hijau yaitu Agrowisata BMJ (Bina Mandiri Jaya). Wisata ini terletak di desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Wisata BMJ dimiliki oleh perseorangan yang merupakan anggota Koperasi Bina Mandiri Jaya dan berkolaborasi dengan warga sekitar. Konsep wisata ini bertema kembali ke alam, yang akan membuat wisatawan tenang dan santai. Wisata ini merupakan wisata buatan dengan menyajikan konsep indoor dengan konsep rumah joglo, kolam ikan buatan, dan konsep indoor memanfaatkan sejuk dan rindangnya pepohonan jati. Harga tiket masuk cukup terjangkau sehingga banyak orang berkunjung untuk menikmati ketenangan di BMJ.



Gambar 5. Agrowisata BMJ.

Selain itu, wisata yang kalah menarik adalah Lembah Akasia yang terletak di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Lembah akasia merupakan wisata buatan yang berada dipinggir sungai way sekampung. Tentu saja, wisata ini menyajikan view sungai way sekampung dan mengusung pohon akasia sebagai tempat berteduh bagi wisatawan. Tempat wisata ini ramai dikunjungi wisatawan untuk tempat gathering/reuni, atau hanya sekedar berkumpul dan ngobrol santai. Lembah akasia merupakan milik perseorangan yang berkolaborasi dengan UMKM sekitar untuk menarik pengunjung.



Gambar 6. Objek Wisata Lembah Akasia.

Berdasarkan prisma keberlanjutan, pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan dan teknologi. Pandangan ini pula yang menjadi salah satu konsep dasar dalam penelitian ini. Pembangunan di Indonesia masih belum menunjukkan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan dan teknologi. Pembangunan masih sangat dominan memperhatikan dimensi ekonomi dan sosial, tetapi lemah dalam pembangunan dimensi yang lain. Dimensi sosial menitikberatkan pada aset dan kemampuan individu sebagai pelaku, gender, seperti kesehatan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Sedangkan dimensi kelembagaan merupakan sistem yang mengatur hubungan antar individu. Seperti dimensi yang lain, dimensi kelembagaan juga mempunyai tujuannya sendiri, seperti keamanan sosial, kesempatan semua masyarakat untuk berpartisipasi, kesetaraan

dan pemerataan. Seiring dengan perubahan dinamis dalam tatanan global, peran teknologi menjadi semakin penting dalam membentuk pola pembangunan berkelanjutan. Teknologi bukan hanya sekadar alat, tetapi juga katalisator yang memungkinkan terciptanya solusi inovatif untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern. Pentingnya teknologi dalam konteks pembangunan berkelanjutan tak terlepas dari kontribusinya dalam transformasi sektor energi. Inovasi di bidang energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, telah mengubah paradigma pemenuhan kebutuhan energi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, teknologi juga memainkan peran signifikan dalam menggiring perubahan dalam sektor transportasi, Informasi Promosi, pendigitalan, dan analisis data besar yang mendukung pengambilan keputusan berkelanjutan.

Pembangunan bukan hanya penting untuk meningkatkan taraf hidup dalam arti materiil, melainkan juga dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan yang hakiki. Lagipula peningkatan mutu kehidupan juga akan lebih berarti bagi masyarakat apabila pola pembangunan yang dilaksanakan berhasil membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mengadakan pilihan antara berbagai ragam kegiatan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut pengendalian sumber alam secara fisik. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat, misalnya dengan fiskal yang mengatur perilaku ekonomi dan social seseorang ataupun sesuatu lembaga. Keeratan kaitan itu ada karena kebijaksanaan fiskal secara tidak langsung mengatur juga peran serta masyarakat luas tanpa melihat jenis kelamin dalam pembinaan etika lingkungan dan dengan demikian akan menentukan pula apakah kegiatan pembangunan akan dilaksanakan selaras dan serasi dengan wawasan lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Pengembangan wisata di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, membawa peluang ekonomi bagi warga sekitar destinasi. Namun, pengembangan ini juga memunculkan risiko pada lingkungan, tata kelola, dan relasi sosial. Perubahan pemanfaatan lahan untuk akses, fasilitas, dan zona usaha wisata dapat mengubah

pola mata pencaharian. Perubahan itu juga dapat memengaruhi pola interaksi sosial yang selama ini terbentuk dalam komunitas lokal.

Isu keberlanjutan pariwisata kini bergerak ke arah yang lebih spesifik. Literatur terbaru menekankan kebutuhan daya lenting dan adaptasi destinasi terhadap tekanan eksternal, termasuk agenda SDGs, isu iklim, digitalisasi, dan dinamika kunjungan. Kerangka ini menuntut strategi yang tidak berhenti pada “pengembangan”, tetapi juga pada “ketahanan sistem destinasi” (Mihalic, 2024).

Pada saat yang sama, teknologi menjadi dimensi yang semakin sulit diabaikan. Studi tentang digitalisasi pariwisata menunjukkan bahwa interaksi digital antarpemangku kepentingan dapat mendukung capaian sosial, lingkungan, dan ekonomi, tetapi dampaknya bergantung pada kesiapan aktor lokal dan kebijakan wilayah (Myrovali et al., 2025). Temuan lain pada konteks ekowisata pintar menegaskan peran IoT, AI, dan aplikasi digital untuk menekan dampak ekologis dan memperbaiki pengelolaan, dengan syarat kolaborasi multipihak berjalan efektif (Zhang & Deng, 2024). Selain itu, kajian sistematis tentang smart tourism technologies mengelompokkan faktor yang memengaruhi kepuasan wisatawan dan menegaskan kebutuhan indikator yang terukur untuk mengevaluasi manfaat teknologi pada pengalaman wisata (Yap et al., 2025).

Strategi pengembangan wisata berbasis keberlanjutan membutuhkan ukuran kinerja yang operasional. Metode Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan pendekatan Rappfish banyak dipakai untuk menilai status keberlanjutan lintas dimensi, lalu mengidentifikasi atribut paling sensitif melalui leverage analysis berbasis nilai Root Mean Square (RMS). Atribut sensitif ini dapat menjadi titik ungkit intervensi kebijakan (Widyawati et al., 2024). Pada studi lain di Indonesia, MDS dipakai untuk memperoleh indeks keberlanjutan per dimensi sekaligus memetakan atribut sensitif yang kemudian dijadikan dasar penyusunan strategi pembangunan wisata perdesaan (Saputro et al., 2023).

Konteks Pringsewu juga menunjukkan kebutuhan strategi yang terhubung dengan praktik pengelolaan di tingkat lokal. Penelitian di Pringsewu menggambarkan dinamika kolaborasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada beberapa objek wisata, dengan fokus pada kesadaran manfaat pariwisata bagi keberlanjutan

penghidupan rumah tangga, pelestarian nilai sosial-budaya, dan keberlanjutan lingkungan (Singgalen et al., 2023). Literatur tentang community-based tourism juga menyoroti bahwa kemitraan dan relasi kuasa antar aktor dapat memperkuat atau justru menghambat tujuan pembangunan wisata yang inklusif, sehingga desain kebijakan harus membaca kapasitas dan posisi aktor secara nyata (Dolezal & Novelli, 2020).

Dengan memperhatikan beberapa pernyataan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan. Pokok pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana *leveraging level* keberlanjutan pariwisata di Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana peran 5 dimensi berkelanjutan dalam *leveraging level* keberlanjutan pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pringsewu?
3. Bagaimana rancangan strategi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengembangan sektor wisata melalui *leveraging level* keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan di Kabupaten Pringsewu. Secara rinci, tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis dan mewujudkan keberlanjutan pariwisata Kabupaten Pringsewu berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan infrastruktur teknologi
2. Menganalisis hubungan dimensi keberlanjutan pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pringsewu
3. Merancang strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi penyusunan kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan wisata di Kabupaten Pringsewu. Dengan menggunakan indeks pembangunan berkelanjutan, pengukuran dapat dilakukan secara lebih komprehensif, meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya, lingkungan (ekologi), kelembagaan, dan teknologi. Hasil pengukuran ini dapat memberikan gambaran capaian masing-masing dimensi, mengidentifikasi dimensi yang paling lemah, serta menentukan atribut pengungkit (*leverage factors*) yang paling berpengaruh. Temuan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah merumuskan arah, prioritas program, dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu secara lebih terukur dan tepat sasaran.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pringsewu perlu mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang dikenalkan pada tahun 1987 oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development, WCED) melalui laporan *Our Common Future*. Menurut WCED (1987), pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan hati-hati, dengan menjaga sumber daya alam dan sumber daya manusia agar tetap tersedia dan berfungsi bagi generasi sekarang dan generasi berikutnya.

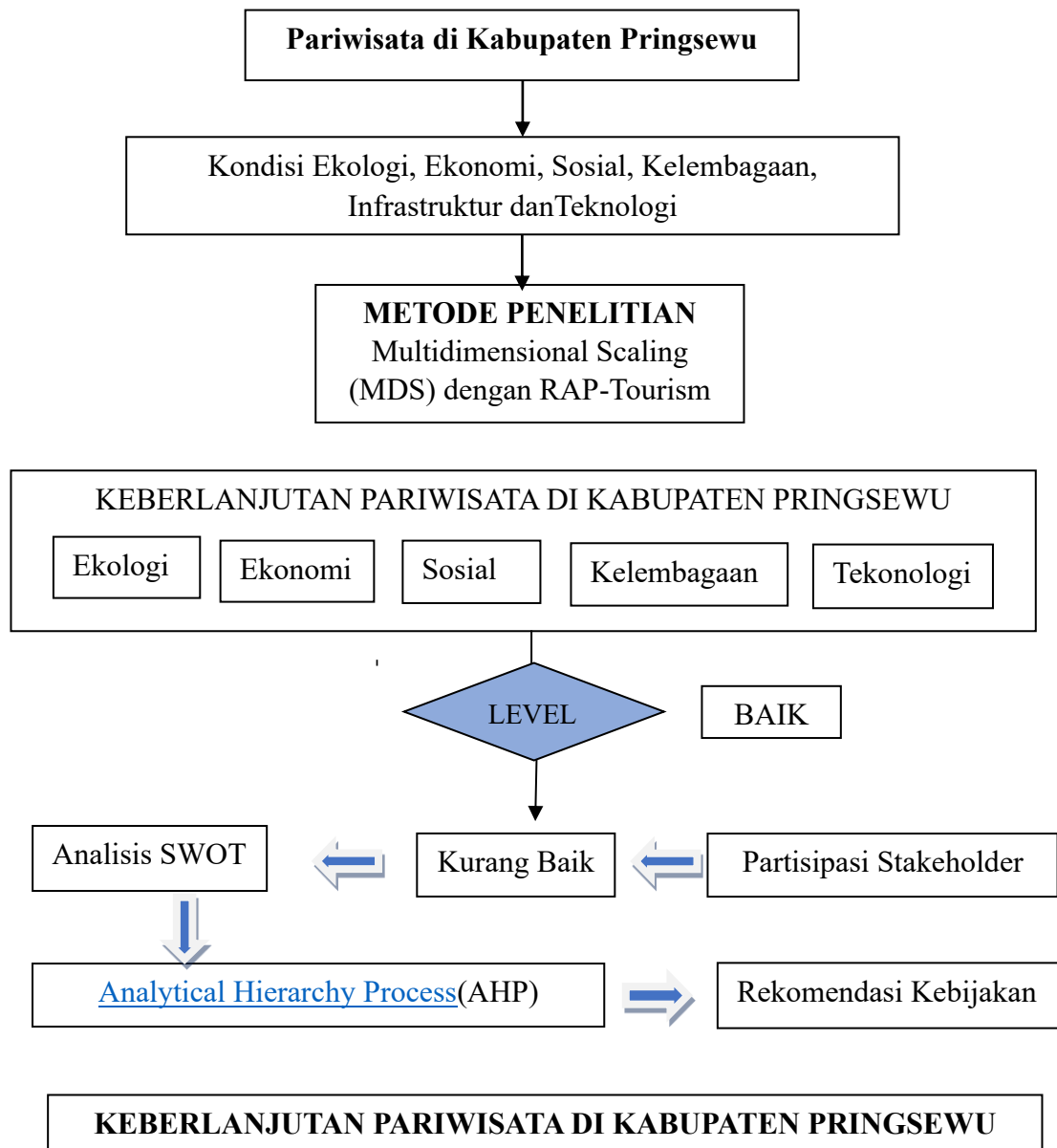
Mengacu pada konsep tersebut, pengembangan wisata berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu dinilai perlu dianalisis melalui lima dimensi utama, yaitu: ekologi (lingkungan), ekonomi, sosial-budaya, kelembagaan-hukum, dan teknologi. Setiap dimensi memiliki kriteria dan atribut yang menggambarkan kondisi keberlanjutan. Penentuan kriteria dan atribut dilakukan melalui studi pustaka, serta diperkaya melalui konsultasi pakar dan pemangku kepentingan yang relevan di lokasi penelitian. Selanjutnya, bobot dan penilaian atribut ditetapkan melalui kombinasi

studi pustaka, masukan pakar, serta scientific judgement, sehingga indikator yang digunakan tetap kontekstual dengan karakter Pringsewu.

Langkah awal penelitian ini dimulai dengan inventarisasi kondisi pengembangan pariwisata Kabupaten Pringsewu menggunakan data sekunder, meliputi penelitian terdahulu, dokumen perencanaan pembangunan, serta dokumen penataan ruang dan kebijakan terkait pariwisata. Setelah itu, penelitian melakukan penilaian kondisi keberlanjutan melalui pemeringkatan (*scoring*) terhadap atribut pada masing-masing dimensi. Untuk membedah masalah penelitian dan menghasilkan ukuran yang terukur, digunakan Multidimensional Scaling (MDS) dengan pendekatan RAP-Tourism untuk menghitung indeks keberlanjutan per dimensi dan indeks gabungan. Hasil MDS kemudian diuji kestabilannya melalui simulasi Monte Carlo untuk melihat konsistensi hasil dan mengurangi bias akibat subjektivitas skor. Setelah indeks diperoleh, dilakukan analisis leverage untuk mengidentifikasi atribut pengungkit (*leveraging factors*), yaitu atribut yang paling sensitif dan paling kuat memengaruhi perubahan nilai indeks pada tiap dimensi. Hasil akhir divisualisasikan melalui kite diagram untuk memperlihatkan profil keberlanjutan antar dimensi secara ringkas dan mudah dibandingkan.

Pada setiap dimensi, penelitian juga memperhitungkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari indikator sosial-budaya dan kelembagaan, terutama dalam aspek perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan kawasan, dan penerimaan terhadap aktivitas wisata. Partisipasi ini diposisikan sebagai elemen evaluatif untuk melihat apakah pengembangan wisata berjalan inklusif dan mendukung ketahanan sosial lokal.

Seluruh hasil analisis kemudian disintesis untuk menyusun rekomendasi strategi pengembangan wisata yang berbasis pada leveraging level keberlanjutan. Strategi disusun dengan prinsip prioritas, yaitu memfokuskan intervensi pada dimensi yang paling lemah dan pada atribut pengungkit yang paling berpengaruh. Pada bagian akhir, rekomendasi kebijakan diarahkan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat arah, program, dan tata kelola pengembangan wisata berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.

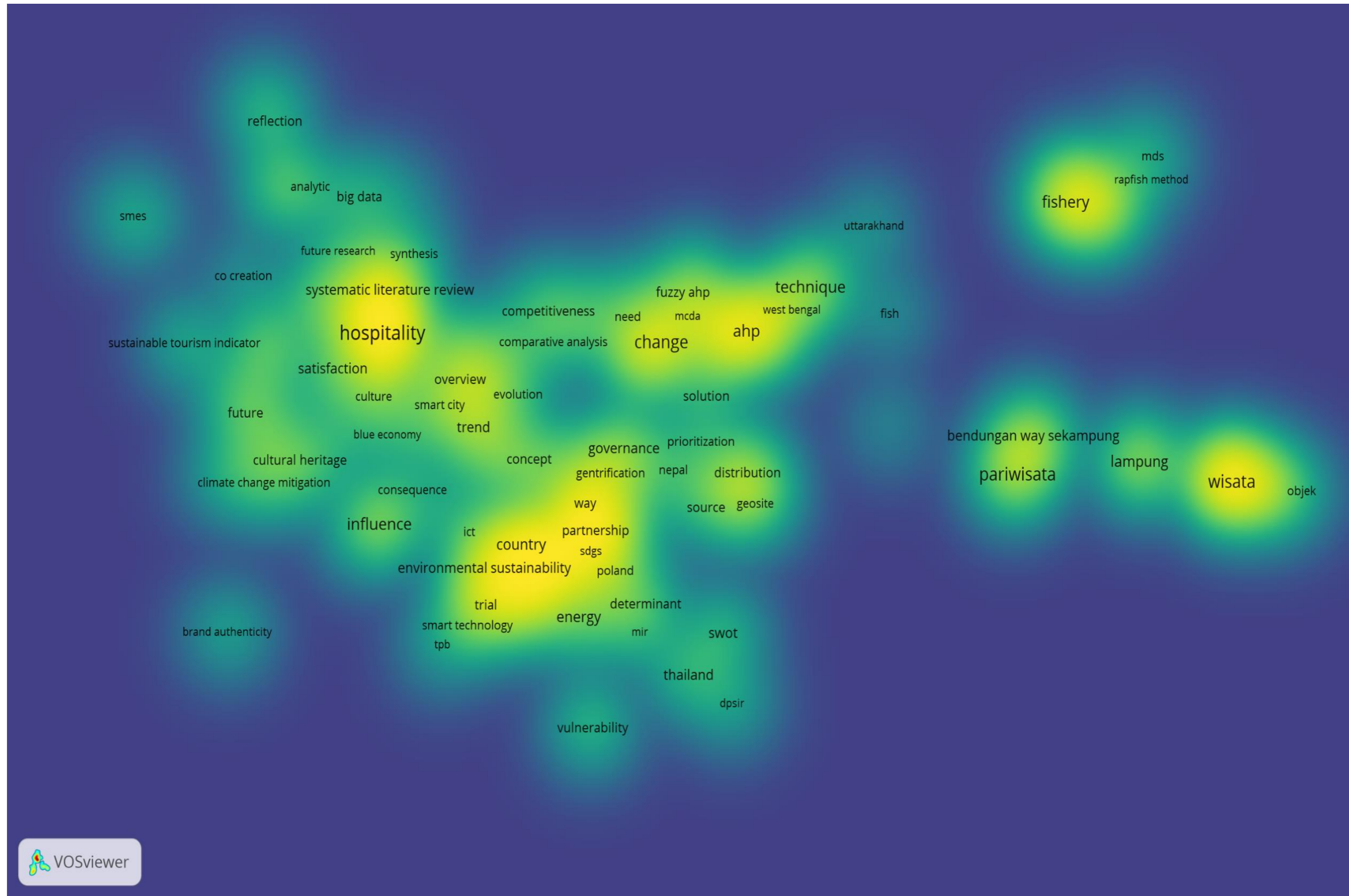


Sumber: Diolah oleh peneliti (2025).

Gambar 7. Kerangka Pikiran.

1.6 Novelty / Kebaruan

Penelitian ini melakukan analisis level keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan dan teknologi pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pringsewu, berdasarkan analisis VOS viewer yang dapat dilihat pada Gambar 8-10.



Gambar 10. Density Visualization.

Tabel 1. Summary Vos Viewer

No	Vos Viewer	Summary
1.	Network Visualization	<p>Network visualization menunjukkan keterkaitan antar variabel penelitian yang dikelompokkan ke dalam beberapa cluster warna. Variabel yang berada dalam satu warna cluster memiliki hubungan yang kuat dan dibahas dalam topik penelitian yang sama. Berdasarkan hasil visualisasi, terbentuk empat cluster utama dengan karakteristik yang berbeda.</p> <p>1. Cluster Hijau (Cluster Utama) Cluster hijau merupakan cluster dominan. Cluster ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian membahas hubungan antara pariwisata, hospitality, perubahan, dan pengembangan wilayah. Variabel-variabel dalam cluster ini juga berkaitan dengan kepuasan, budaya, tren, dan keberlanjutan lingkungan. Dominasi cluster hijau menandakan bahwa fokus utama penelitian pariwisata masih berada pada aspek umum pengembangan dan manajemen pariwisata.</p> <p>2. Cluster Merah Cluster merah menggambarkan penelitian yang berfokus pada dimensi ekonomi, lingkungan, energi, tata kelola, dan keberlanjutan. Variabel seperti environmental sustainability, energy, country, dan governance saling terhubung dalam cluster ini. Cluster ini menunjukkan bahwa kajian keberlanjutan telah banyak dilakukan, namun masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi secara kuat dengan analisis strategi pengembangan wisata.</p> <p>3. Cluster Biru Cluster biru merepresentasikan penelitian yang membahas pendekatan dan teknik analisis, seperti Analytical Hierarchy Process (AHP), technique, dan change. Cluster ini menunjukkan penggunaan metode pengambilan keputusan multikriteria dalam konteks pariwisata. Namun, keterkaitannya dengan analisis strategis dan keberlanjutan masih terbatas, sehingga integrasi metode masih jarang dilakukan.</p>

No	Vos Viewer	Summary
		<p data-bbox="600 293 831 322">4. Cluster Kuning</p> <p data-bbox="600 331 1353 640">Cluster kuning menunjukkan penelitian yang berkaitan dengan analisis keberlanjutan menggunakan RAPPFISH, yang sebelumnya banyak diterapkan pada sektor perikanan dan mulai diadaptasi pada pariwisata. Hubungan cluster ini dengan cluster strategi dan pariwisata masih relatif lemah, menandakan bahwa penggunaan RAPPFISH dalam kajian pengembangan wisata belum banyak dikombinasikan dengan metode lain seperti AHP dan SWOT.</p> <p data-bbox="600 689 1353 1120">Jarak antar cluster menunjukkan tingkat keterhubungan antar topik penelitian. Semakin jauh jarak antar cluster, semakin sedikit penelitian yang mengaitkan variabel-variabel tersebut, sehingga menunjukkan adanya peluang kebaruan penelitian. Pada visualisasi ini terlihat bahwa cluster metode (AHP dan SWOT) serta cluster keberlanjutan (RAPPFISH) masih terpisah dari cluster pariwisata wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis strategi dan keberlanjutan wisata secara komprehensif, khususnya pada wilayah spesifik seperti wisata Pringsewu.</p>
2.	Overlay Visualization	<p data-bbox="600 1128 1353 1196">Overlay visualization menghasilkan kebaruan penelitian berdasarkan tahun publikasi penelitian.</p> <p data-bbox="600 1227 1353 1375">Semakin gelap warna bulatan cluster artinya penelitian tersebut sudah diteliti pada tahun sebelumnya atau sudah lama. Sedangkan semakin terang warna clusternya artinya semakin baru tahun penelitian tersebut.</p> <p data-bbox="600 1406 1353 1760">Overlay Visualization menunjukkan bahwa penggunaan AHP, SWOT, dan RAPPFISH termasuk topik yang relatif baru. Warna yang lebih terang mengindikasikan peningkatan publikasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penelitian yang menggabungkan ketiga metode tersebut untuk menganalisis pengembangan dan keberlanjutan wisata daerah masih sangat terbatas. Tidak terdapat publikasi terbaru yang mengkaji Pringsewu sebagai objek penelitian.</p>
3.	Density Visualization	<p data-bbox="600 1787 1353 1854">Density visualization menghasilkan kebaruan penelitian berdasarkan tingkat kecerahan warna variabel.</p> <p data-bbox="600 1886 1353 1998">Density Visualization menunjukkan kepadatan tinggi pada tema umum pariwisata dan hospitality. Sebaliknya, kepadatan rendah terlihat pada variabel yang berkaitan</p>

No	Vos Viewer	Summary
		<p>dengan analisis strategis terintegrasi dan keberlanjutan berbasis wilayah lokal. Kondisi ini menandakan peluang kebaruan penelitian melalui pendekatan multidimensi dan multimetode.</p> <p>Semakin berwarna kuning terang maka semakin banyak penelitian yang membahas variabel-variabel tersebut. Sedangkan semakin gelap/tidak terlalu cerah maka semakin sedikit penelitian yang membahas variabel-variabel tersebut. Maka jika ingin meneliti variabel-variabel yang jarang dibahas maka disebut kebaruan penelitian.</p>

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan analisis Vos Viewer dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang mengkaji pengembangan wisata Pringsewu dengan mengombinasikan AHP, SWOT, dan analisis keberlanjutan RAPPFISH. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah yang jelas dengan menawarkan pendekatan analisis strategis dan keberlanjutan yang terintegrasi, sistematis, dan relevan untuk pengambilan keputusan pengembangan wisata daerah.

Tabel 2. Disertasi tentang Wisata

Aspek	Disertasi	Rahayu (2025)	Antonius (2018)	Dwi Budi Wiyanto (2021)
Objek Penelitian	Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Lampung	Wisata alam di Provinsi Lampung	Ekowisata Hutan Rawa, Sintang, Kalimantan Barat	Wisata selam perairan Tulamben-Bali
Jenis Wisata	Wisata Alam	Ekowisata/alam berbasis sumber daya fisik dan manusia	Ekowisata Hutan Rawa Gambut	Ekowisata/alam berbasis sumber daya fisik dan manusia
Variabel	5 dimensi : ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan dan Teknologi infrastruktur	5 variabel : Daya tarik objek wisata (sumber daya fisik), hospitality dan kualitas layanan (sumber daya manusia); Kepuasan pengunjung; Minat kunjungan ulang	3 dimensi : ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan	5 Dimensi : Ekologi, Ekonomi, Sosial-Budaya, Hukum dan Kelembagaan, Infrastruktur dan Teknologi
Metode Analisis	Analisis RAP-Tourism (Rapfish 3.1) Analisis SWOT Analisis AHP	PLS-SEM (Partial Least Squares-SEM 4.1)	Analisis RAP-Tourism (Rapfish 3.1) Analisis SWOT Analisis QSPM	Analisis Daya Dukung, Analisis Keberlanjutan dengan RAP-Fish
Fokus	Keberlanjutan wisata, faktor pengungkit keberlanjutan wisata multi dimensi	Hospitality dan kualitas layanan sebagai representasi sumber daya manusia	Pengelolaan berkelanjutan hutan rawa gambut	Pengelolaan Wisata Selam dengan analisis daya dukung dan analisis keberlanjutan

Kontribusi	Memberikan informasi keberlanjutan wisata, faktor pengungkit berberlanjutan dan strategi pengembangan wisata berkesinambungan secara multi dimensi	Peningkatkan model perilaku minat kunjungan ulang berbasis peningkatan sumberdaya manusia	Memberikan informasi keberlanjutan ekowisata hutan wa gambut, strategi pengolahan hutan rawa gambut.	Menghasilkan model dinamika sistem pengelolaan wisata selam Tulamben berdasarkan pada konsep keberlanjutan (sustainability)
-------------------	--	---	--	---

Sumber: data diolah peneliti, 2026

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Risalah Teori Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan berkembang sebagai respons atas kritik terhadap model Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan batas ekologis dan keadilan sosial. Definisi yang paling sering dijadikan rujukan berasal dari Laporan Brundtland, yang menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam perkembangannya, gagasan ini diperkaya melalui agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang memberikan kerangka tujuan dan indikator lintas sektor, termasuk pariwisata,

Dalam literatur, Pembangunan berkelanjutan umumnya dibahas melalui kerangka “tiga pilar” (ekonomi-sosial-lingkungan) yang populer dikenal sebagai *Triple Bottom Line* (TBL). Kerangka TBL menuntut agar keberhasilan Pembangunan tidak dinilai dari kinerja ekonomi saja, tetapi juga dampak dari sosial (misalnya kualitas kerja, pemerataan manfaat, partisipasi Masyarakat) dan dampak lingkungan (misalnya konservasi, emisi, air, limbah). Kajian-kajian mutakhir menegaskan bahwa TBL tetap relevan sebagai perangkat konseptual untuk menilai keberlanjutan, sekaligus menjadi jembatan antara kebijakan public dan praktik tata Kelola sektor-sektor Pembangunan.

Dalam konteks pariwisata, Pembangunan berkelanjutan memiliki karakter yang khas karena pariwisata bergantung pada kualitas sumber daya (alam, budaya, ruang publik) tetapi juga dapat menjadi tekanan bagi sumber daya itu sendiri. Karena itu, pendekatan evaluasi berkelanjutan dalam pariwisata memerlukan indikator yang mampu menangkap “manfaat” sekaligus “biaya/risiko” secara terukur. Pada level

global, *UN Tourism* (UNWTO) mengembangkan *Measuring the Sustainability of Tourism* (MST) dan *Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism* (SF-MST) yang diakui dalam system statistika PBB sebagai kerangka untuk mengukur dampak dan ketergantungan pariwisata terhadap ekonomi, Masyarakat, dan lingkungan, termasuk pada level subnasional (daerah). Kerangka ini penting karena menyediakan bahasa ukur yang lebih “akuntabel“ bagi pemerintah daerah : pariwisata tidak hanya dilaporkan sebagai jumlah kunjungan, tetapi juga bagaimana hal tersebut memengaruhi penggunaan air/energi, tekanan pada ekosistem, distribusi manfaat ekonomi, hingga aspek tata Kelola.

Selain MST/SF-MST, UN Tourism Bersama JICA juga menerbitkan *Toolkit of Indicators for Projects* (TIPs) untuk menilai kontribusi proyek pariwisata terhadap SDGs. *Toolkit* ini menekankan bahwa proyek pariwisata seharusnya dievaluasi melalui indicator dampak, bukan hanya indicator *output* (misalnya “berapa fasilitas dibangun”), tetapi juga *outcome* (misalnya “berapa pekerjaan layak tercipta” , “bagaimana dampak terhadap lingkungan” , “seberapa besar keterlibatan Masyarakat”).

Bagi penelitian Pembangunan wilayah, teori Pembangunan berkelanjutan juga berisikan dengan gagasan tata Kelola (*governance*). Keberlanjutan tidak cukup dicapai melalui program fisik (infrastruktur), tetapi memerlukan kelembagaan yang mampu mengatur, mengawasi, dan menyeimbangkan kepentingan aktor (pemerintah, swasta, masyarakat). Hal ini sejalan dengan argumen bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah proses negosiasi kepentingan lintas aktor, lintas skala (desa-kabupaten-provinsi), dan lintas sektor (pariwisata, lingkungan, pekerjaan umum, UMKM/ekonomi kreatif). Dengan demikian, teori Pembangunan berkelanjutan dalam penelitian pariwisata wilayah mengarah fokus pada dua hal : (1) bagaimana pertumbuhan ekonomi pariwisata dibangun tanpa melampaui batas daya dukung; serta (2) bagaimana manfaatnya didistribusikan secara lebih adil melalui tata Kelola dan kelembagaan yang efektif.

Secara operasional, implikasi teoritisnya Adalah pengukuran kinerja pariwisata berkelanjutan perlu mencakup indicator ekonomi (pendapatan, lapangan kerja, *local value capture*), indicator sosial (partisipasi, inklusi, konflik, kualitas kerja),

indikator lingkungan (limbah, air, tekanan ekosistem, daya dukung), dan indikator tata Kelola (koordinasi, kepatuhan tata ruang, transparansi, kapasitas institusi). Kerangka MST/SF-MST dan TIPS menyediakan rujukan indikator yang dapat diadaptasi pada konteks daerah, sehingga penelitian tidak berhenti pada deskripsi “ramai atau tidak ramai”, melainkan mampu menilai keberlanjutan secara sistematis.

2.1 Lingkungan sebagai *Common pool resources*

Lingkungan merupakan elemen fundamental dalam pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata berbasis alam dan wisata air. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan dan pembangunan berkelanjutan, lingkungan tidak hanya dipahami sebagai aset ekologis, tetapi juga sebagai sumber daya bersama atau *common pool resources* (CPR). Sumber daya ini memiliki dua karakter utama, yaitu sulitnya membatasi akses pemanfaatan dan tingginya tingkat rivalitas dalam penggunaan. Karakter tersebut menyebabkan lingkungan rentan terhadap degradasi apabila pemanfaatannya tidak diatur secara kolektif dan berkelanjutan.

Konsep *common pool resource* memperoleh pijakan teoritis yang kuat melalui karya Elinor Ostrom yang mengkritik pandangan klasik *tragedy of the commons*. Ostrom menegaskan bahwa kerusakan sumber daya Bersama bukanlah konsekuensi alamiah dari kepemilikan kolektif, melainkan akibat kegagalan institusi dalam mengatur perilaku pengguna. Dalam konteks pariwisata, lingkungan seperti Sungai, danau, Kawasan hutan, pesisir, dan lanskap bendungan dimanfaatkan secara simultan oleh berbagai aktor, termasuk wisatawan, pelaku usaha, Masyarakat lokal, dan pemerintah. Ketika pemanfaatan ini tidak diimbangi dengan aturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, tekanan terhadap daya dukung lingkungan menjadi tidak terhindarkan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu pengguna CPR lingkungan yang paling intensif. Studi di berbagai destinasi wisata alam Asia dan Amerika Latin menemukan bahwa peningkatan jumlah wisatawan sering diikuti oleh penurunan kualitas air, degradasi vegetasi, peningkatan limbah, serta gangguan terhadap keanekaragaman hayati (Buxkley, 2021; Zhang & Li, 2023). Dampak tersebut

bersifat komutatif dan sering kali tidak langsung terlihat dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menurunkan daya Tarik destinasi dalam jangka menengah dan Panjang.

Pada konteks pariwisata berkelanjutan, lingkungan sebagai CPR menuntut pendekatan pengelolaan yang bersifat kolektif dan partisipatif. Literatur mutakhir menekankan bahwa keterlibatan Masyarakat lokal merupakan factor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya bersama. Masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai penerima dampak, tetapi juga sebagai aktor utama yang memiliki pengetahuan lokal dan keppentingan jangka Panjang terhadap kelestarian lingkungan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa destinasi wisata dengan Tingkat partisipasi komunitas yang tinggi cenderung memiliki kualitas yang lebih terjaga dan konflik pemanfaatan yang lebih rendah (Rasoolimanesh et al ., 2021)

Aspek kelembagaan memainkan peran sentral dalam pengelolaan lingkungan sebagai CPR. Kelembagaan mencakup rugulasi, struktur organisasi, Pembagian kewenangan, serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa fragmentasu kebijakan dan tumpang tindih kewenangan sering menjadi penyebab utama kegagalan pengelolaan lingkungan di destinasi wisata. Ketika sektor pariwisata, lingkungan, dan tata ruang berjalan sendiri-sendiri, tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengendalikan tekanan terhadap sumber daya bersama. Sebaliknya, kerangka kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif mampu menginternalisasi kepentingan konservasi ke dalam aktivitas pariwisata (Agrawal, 2021)

Pengelolaan CPR juga berkaitan erat dengan perencanaan wilayah dan tata ruang. Penelitian 2020-2025 menunjukkan bahwa banyak destinasi wisata berkembang tanpa mempertimbangkan daya dukunh lingkungan dan kapasitas ekosistem. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dan pengembangan pariwisata mempercepat degradasi sumber linkungan. Dalam konteks ini , lingkungan sebagaimana CPR menuntut integrasi kebijakan lintas setrot. Agar pemanfaatan ruang dan sumber daya berjalan secara terkendali dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi memberikan peluang baru dalam pengelolaan lingkungan sebagai CPR. Teknologi pemantauan kualitas air, sistem informasi geografi, dan

platform digital untuk pelaporan lingkungan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya. Studi mutakhir menunjukkan bahwa teknologi dapat berfungsi sebagai alat pendukung pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, terutama pada destinasi wisata dengan keterbatasan kapasitas pengelolaan konvensional (Hall & Williams, 2021). Namun, literatur juga menegaskan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan peran institusi dan partisipasi masyarakat. Tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, teknologi berpotensi menjadi instrumen yang tidak efektif.

Pada kawasan wisata berbasis air dan lanskap bendungan, lingkungan sebagai CPR memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Bendungan berfungsi sebagai infrastruktur teknis, sumber daya air, ruang ekologi, dan objek wisata secara bersamaan. Aktifitas wisata di sekitar bendungan meningkatkan nilai ekonomi wilayah, tetapi juga menambahkan tekanan kualitas air, sempadan dan ekosistem perairan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa wisata berbasis bendungan sering menghadapi konflik pemanfaatan antara sektor pariwisata, pertanian, dan kebutuhan air baru masyarakat apabila tidak diatur secara terpadu (Zhang & Li, 2023).

Perkembangan pengelolaan CPR yang efektif dalam pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aturan formal dan norma lokal. Aturan formal yang tidak selaras dengan praktik lokal sering sulit diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, integrasi kearifan lokal, kesepakatan komunitas, dan peran organisasi masyarakat seperti kelompok sadar wisata mampu memperkuat kepatuhan dan pengawasan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengembangannya berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan sumber daya.

Konsep lingkungan sebagai *common pool resources* memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami keterkaitan antara dimensi ekologi, sosial dan kelembagaan dalam keberlanjutan pariwisata. Lingkungan diposisikan sebagai aset bersama yang memerlukan pengelolaan kolektif berbasis aturan, partisipasi, dan pengawasan. Dengan pendekatan ini, keberlanjutan lingkungan tidak hanya

dipahami sebagai tujuan normatif, tetapi sebagai prasyarat struktural bagi keberlanjutan ekonomi dan sosial destinasi wisata.

2.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan rekreasi, Pendidikan, bisnis, maupun kepentingan lainnya. *World Tourism Organization* mendefinisikan pariwisata sebagai fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan pergerakan manusia lintas ruang yang menghasilkan interaksi antara wisatawan, Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah. Definisi ini menegaskan bahwa pariwisata bukan sekedar aktivitas konsumsi, melainkan sebuah sistem yang kompleks dan terintegrasi.

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional (Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan). Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan). Wisata alam adalah suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Direktorat Pemanfaatan Alam dan Jasa Lingkungan, 2002).

Perkembangan pariwisata modern menunjuka pergeseran signifikan dari pariwisata massal menuju pariwisata berbasis pengalaman, alam, dan kualitas lingkungan. Pandemi COVID-19 mempercepat perubahan preferensi wisata kearah destinasi yang menawarkan keamanan, keberlanjutan dan keterhubungan dengan alam. Higgins-Desbiolles et al. (2021) menegaskan bahwa krisis global telah membuka ruang refleksi kritis terhadap model pariwisata konvensional yang terlalu berorientasi pada volume kunjungan dan pertumbuhan jangka pendek. Pariwisata alam dan wisata berbasis lanskap air mengalami peningkatan minat, tetapi juga menghadapi tekanan ekologis yang tinggi. Studi Zhang et al. (2024) menunjukkan bahwa destinasi wisata alam yang berkembang pesat tanpa pengendalian daya dukung cenderung mengalami penurunan kualitas lingkungan dan kepuasan wisatawan dalam jangka menengah. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan prasyarat utama bagi daya saung destinasi wisata.

Pariwisata sebagai sistem juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan teknologi. Kebijakan publik, regulasi tata ruang, serta kapasitas kelembagaan pengelola destinasi menentukan arah dan kualitas pengembangan pariwisata. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam pemasaran destinasi, manajemen pengunjung, dan peningkatan kualitas layanan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa destinasi yang mampu mengadopsi teknologi secara adaptif cenderung memiliki kinerja pariwisata yang lebih stabil dan inklusif (Liu et al., 2023). Pariwisata perlu dipahami sebagai sistem multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kelembagaan, dan teknologi. Pemahaman komprehensif ini menjadi landasan penting dalam menganalisis peran pariwisata dalam pembagunan wilayah dan merumuslan strategi pengembangan wisata yang berkelanjutan.

2.3 Pariwisata dalam Pembangunan Wilayah

Pariwisata menempati posisi penting dalam pembagunan wilayah karena kemampuannya memanfaatkan potensi lokal dan mendoronh aktivitas ekonomi lintas sektor. Dalam perspektif

Pembanguna wilayah, pariwisata tidak dipahami sebagai sektor Tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi regional yang saling terkait dengan struktur sosial, tata ruang, dan kebijakan public. Pendekatan ini menempatkan pariwisata sebagai instrument pembangunan yang bersifat spasial, kontekstual, dan bergantung pada karakteristik wilayah.

Teori pembangunan wilayah klasik, seperti *growth pole theory*, Konsep *growth pole theory* pertama kali digunakan oleh Francois Perroux pada tahun 1949. Karyanya berfokus pada topik ini dan menganalisis terutama aspek ekonomi *growth pole theory*. Namun, pendapat para peneliti di bidang ini mengenai *growth pole* pertumbuhan tidak konsensus, terutama jika mempertimbangkan bidang aktivitas para penulis. Jadi, ada berbagai sudut pandang mengenai pertumbuhan yang berasal dari para ekonom, ahli geografi, atau ahli pengembangan wilayah. Gagasan intuitif tentang *growth pole* mengidentifikasi *growth pole* pertumbuhan sebagai suatu industri atau mungkin sekelompok perusahaan dalam suatu industri. Pada kasus ekstrem, *growth pole* pertumbuhan bisa berupa satu perusahaan atau sekelompok industri. Namun, Perroux mendefinisikan *growth pole* pertumbuhan dalam hal apa yang disebutnya ruang ekonomi abstrak. Menurutnya, ruang ekonomi abstrak ini dapat

berupa tiga jenis: rencana ekonomi, bidang atau kekuatan pengaruh, dan agregat homogen. (Hall & Williams, 2022). Selain pendekatan *growth pole*, teori Pembangunan wilayah modern menekankan pentingnya *endogenous development*. Pendekatan ini memandang pembangunan sebagai proses yang bertumpu pada sumber daya internal wilayah, baik sumber daya alam, manusia, maupun kelembagaan. Pariwisata menjadi relevan karena mampu mengonversi keunikan lokal menjadi nilai ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada modal eksternal. Studi oleh Su et al. (2023) menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, penguatan kohesi sosial, dan stabilitas ekonomi wilayah. Dalam praktiknya, peran pariwisata dalam pembangunan wilayah sering dikaitkan dengan upaya pengurangan ketimpangan spasial. Banyak wilayah pedesaan serta pinggiran kota mengandalkan pariwisata sebagai alternatif

Pembangunan untuk mengatasi keterbatasan lapangan kerja dan akses ekonomi. Namun, literatur mutakhir mengingatkan bahwa pariwisata tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan manfaat. Tanpa perencanaan yang matang, pariwisata justru dapat memperlebar kesenjangan antar wilayah melalui konsentrasi investasi ekonomi pada wilayah tertentu saja.

Fenomena *enclave tourism* menjadi salah satu isu utama dalam kajian pariwisata dan Pembangunan wilayah. *enclave tourism* terjadi ketika wilayah wisata berkembang secara terpisah dari sistem ekonomi lokal, sehingga manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh investor eksternal dibandingkan masyarakat setempat. Penelitian Here & Solihin (2026) menunjukkan bahwa *enclave tourism* sering muncul pada destinasi yang berkembang pesat di sekitar infrastruktur besar, seperti Kawasan pesisir, bendungan, dan taman wisata alam, terutama Ketika regulasi tata ruang dan mekanisme distribusi manfaat tidak berjalan efektif.

Oleh karena itu, integrasi pariwisata dalam perencanaan tata ruang wilayah menjadi prasyarat penting dalam Pembangunan wilayah yang inklusif. Perencanaan ruang yang baik memungkinkan pengendalian pemanfaatan lahan, perlindungan Kawasan lindung, serta pengaturan zona wisata agar sesuai dengan daya dukung lingkungan, studi oleh (Khan, 2021) menegaskan bahwa destinasi yang mengintegrasikan indikator keberlanjutan ke dalam perencanaan ruang cenderung memiliki konflik pemanfaatan ruang yang lebih rendah dan kinerja pariwisata yang lebih stabil.

Pariwisata juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur wilayah. Pengembangan destinasi wisata mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas melalui Pembangunan jalan, transportasi publik, jaringan listrik, air bersih, dan teknologi informasi. Infrastruktur tersebut tidak hanya melayani kebutuhan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Penelitian Kurniawan & Iriani, (2024) menunjukkan bahwa wilayah dengan pengembangan pariwisata terencana mengalami peningkatan kualitas layanan publik dan indeks pembangunan manusia dibandingkan wilayah yang tidak mengintegrasikan pariwisata dalam strategi pembangunan wilayah.

Namun, pembangunan infrastruktur yang didorong oleh pariwisata juga berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan dan sosial apabila tidak dikendalikan. Peningkatan aksesibilitas dapat memicu alih fungsi lahan, degradasi ekosistem, dan peningkatan beban lingkungan. Oleh karena itu, literatur menekankan pentingnya pendekatan pembangunan wilayah yang berorientasi pada keberlanjutan, dimana pertumbuhan pariwisata harus diselaraskan dengan kapasitas lingkungan dan kebutuhan sosial masyarakat.

Dimensi kelembagaan memegang peran senta dalam menentukan keberhasilan pariwisata sebagai instrumen pembangunan wilayah. Kualitas tata kelola, koordinasi antar instansi, dan kapasitas pemerintah daerah memengaruhi efektivitas kebijakan pariwisata. Penelitian periode 2020-2025 menunjukkan bahwa wilayah dengan tata kelola yang kuat dan partisipatif lebih mampu mengelola dampak pariwisata dan mendistribusikan manfaat secara adil (Saarinen, 2021).

Sebaliknya, lemahnya tata kelola sering menyebabkan eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan konflik kepentingan antar aktor.

Kelembagaan lokal, seperti kelompok sadar wisata, badan usaha milik desa, dan lembaga pengelola destinasi, berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi. Studi empiris menunjukkan bahwa wilayah dengan kelembagaan lokal yang aktif memiliki tingkatan penerimaan sosial terhadap pariwisata yang lebih tinggi dan konflik yang lebih rendah (Su et al., 2023)

Dalam konteks pembangunan wilayah modern, pariwisata juga dikaitkan dengan konsep ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk bertahan dan beradaptasi terhadap guncangan eksternal, seperti krisis ekonomi, pandemi, dan perubahan iklim. Pariwisata yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan wilayah dengan menyediakan sumber pendapatan alternatif dan memperkuat jejaring ekonomi lokal. Penelitian terbaru menunjukkan wilayah dengan struktur ekonomi yang terdiversifikasi, termasuk sektor pariwisata, cenderung lebih cepat pulih dari krisis dibandingkan wilayah yang bergantung pada satu sektor dominan.

Pariwisata dalam pembangunana wilayah harus dipahami sebagai proses yang kompleks dan multi dimensi. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi oleh sejauh mana pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan memperkuat kelembagaan lokal. Pendekatan ini menjadi sangat relevan bagi wilayah yang mengembangkan pariwisata di sekitar infrastruktur strategis, di mana tekanan terhadap ruang dan sumber daya cenderung lebih tinggi.

Pengembangan pariwisata di tingkat wilayah memerlukan kerangka analisis yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan secara simultan. Oleh karena itu, kajian pariwisata dalam pembangunana wilayah perlu diarahkan pada evaluasi keberlanjutan dan perumusan strategi pengembangan yang berbasis kondisi lokal. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat bagi penelitian selanjutnya dalam menilai peran pariwisata sebagai instrumen pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

2.4 Keberlanjutan Kepariwisataan

Keberlanjutan pariwisata merupakan konsep kunci dalam menjawab tantangan pembangunan destinasi di tengah meningkatnya tekanan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan kompleksitas tata kelola wilayah. Sejak decade terakhir, pariwisata tidak lagi dipahami semata sebagai sektor mengasil devisa atau pencipta lapangan pekerjaan, tetapi sebagai system Pembangunan yang berinteraksi langsung dengan daya dukung lingkungan, struktur sosial Masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan dinamika teknologi. Pergeseran ini semakin menguat pasca 2020, Ketika berbagai krisis global menyorotu kerentanan destinasi wisata yang bertumpu pada pertumbuhan kuantitatid tanpa fondasi keberlanjutna yang kuat.

Keberlanjutan pariwisata merupakan model alternatif dan wujud dari kritik pada pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan. Strategi pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan ini sangat mengutamakan perolehan devisa dan pertumbuhan ini sangat mengutamakan perolehan devisa dan pertumbuhan investasi di sektor kepariwisataan. Parameter utama yang digunakan untuk mengukur kinerja pariwisata yaitu jumlah

kedatangan, lama tinggal wisatawan, pembelajarannya selama berkunjung dan peningkatan investasi di sektor wisata. Menurut sunaryo (2013) pergeseran model pembangunan kepariwisataan akan disajikan dalam bentuk table :

Table 2. pergederan paradigma dan Strategi Pembangunan kepariwisataan

No	Karakteristik	Orientasi Paradigma Pembangunan kepariwisataan	
		Pertumbuhan	Berlanjut
1.	fokus	<i>Growth : Mass Tourism</i>	<i>Development</i>
2.	Nilai yang dikejar	Devisa & Investasi	<i>Community Based & Green Tourism</i>
3.	indikator	Jumlah kunjungan lama tinggal & Perjalanan Wisatawan	Dampak Multi Ganda dari kepariwisataan
4.	Peran Pemerintah	<i>Entrepreneur & Developer</i>	Fasilitator
5.	Peran Masyarakat akses peran karakter posisi	Tertutup pasif Beneficiaries Maginal	Terbuka Aktif-Partisipatif Entrepreneur Stakeholder
6.	Tuntutan Kualitas	Standart Lokal	Standar Univeral

Sumber :Sunaryo (2013)

Keberlanjutan pariwisata berakar pada paradigma pembanguna berkelanjutan yang menekankan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan

kemampuan generasi mendatang. Dalam konteks pariwisata, prinsip ini diterjemahkan ke dalam pengelolaan destinasi yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, kesejahteraan ekonomi lokal, kohesi sosial, dan efektivitas kelembagaan. Berbagai organisasi internasional peserta UNWTO menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan harus mencakup dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial secara terpadu, serta didukung oleh tata kelola inovasi yang memadai.

Dimensi ekologi menjadi fondasi utama keberlanjutan pariwisata karena seluruh aktivitas bergantung pada kualitas lingkungan dan daya tarik alam. Penelitian Mutakhir menunjukkan bahwa degradasi ekosistem, penurunan kualitas air, dan perubahan lanskap akibat pembangunan wisata yang tidak terkendali berdampak langsung pada perubahan

2.6. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma pembangunan pariwisata konvensional yang menitikberatkan pada peningkatan jumlah kunjungan dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pendekatan tersebut terbukti menghasilkan tekanan lingkungan, ketimpangan distribusi manfaat, serta melemahnya kapasitas sosial dan kelembagaan di banyak destinasi. Sejak awal dekade 2020-an, diskursus pariwisata berkelanjutan mengalami penguatan signifikan, seiring meningkatnya urgensi krisis lingkungan global, perubahan iklim, serta tuntutan pencapaian Sustainable Development Goals. Dalam konteks ini, pariwisata berkelanjutan dipahami sebagai proses pengelolaan destinasi yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Federation of Nature and National Parks (1993) mengartikan Pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai bentuk aktivitas dan pengelolaan pariwisata yang menjaga integritas lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam dan budaya dalam waktu yang tidak terbatas. Sementara Alimudin (2010) dalam Bakri, dkk (2020) mendefinisikan

pariwisata berkelanjutan merupakan penyelenggaraan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini secara bertanggungjawab agar dapat digunakan untuk generasi selanjutnya. Dapat disimpulkan dari definisi-definisi diatas Pembangunan berkelanjutan harus memuat kelayakan ekonomi, kelayakan kapasitas sangga lingkungan, harus bisa diterima secara sosial, dan harus dapat memanfaatkan teknologi.

Bakri, dkk (2020) memberikan penjelasan bahwa kegiatan pariwisata yang dianggap berkelanjutan jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Ekologis berkelanjutan: Pariwisata berkelanjutan tidak memberikan dampak negatif bagi ekosistem atau harus melindungi sumber daya alam.
2. Secara sosial diterima: Pariwisata berkelanjutan harus melibatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengambil peran aktif dalam kegiatan pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial.
3. Secara kultural dapat diterima: Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep Dimana masyarakat local mampu menyesuaikan/beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda mengingat asal muasal wisawatan berasal dari berbagai daerah.
4. Secara ekonomis menguntungkan: kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

Burns dan Holder (1997) mengadaptasikan pembangunan berkelanjutan untuk bidang pariwisata sebagai sesuatu yang menghubungkan lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan wisatawan. Berikut prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan:

1. Lingkungan mempunyai nilai guna bagi manusia untuk jasa wisata. Nilai guna harus mencakup konservasi dan proteksi lingkungan untuk kepentingan masa depan.
2. pariwisata harus dirancang sebagai kegiatan yang positif yang harus menciptakan keuntungan masyarakat dan wisatawan itu sendiri.

3. Pariwisata dan lingkungan memiliki keterkaitan, artinya pariwisata tidak boleh merusak sumber daya alam sehingga tercapai pariwisata berkelanjutan.
4. Harus ada Harmoni dan Keserasian antara kebutuhan wisatawan, lokasi kegiatan, dan kebutuhan masyarakat. Artinya manfaat yang diperoleh dari kegiatan wisata harus lebih besar daripada biaya rekonstruksi kerusakan.
5. Harus dibangun sinergi antara pelaku industry pariwisata, pemerintah dan kelompok LSM untuk menjaga ekosistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya.

Secara konseptual, pariwisata berkelanjutan berakar pada konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial. Namun, perkembangan teori mutakhir menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut tidak cukup menjelaskan kompleksitas pengelolaan destinasi wisata modern. Studi-studi terbaru menegaskan pentingnya dimensi kelembagaan dan teknologi sebagai faktor penentu keberlanjutan, terutama pada destinasi yang berkembang pesat akibat investasi infrastruktur dan intervensi kebijakan skala besar. Oleh karena itu, pendekatan pariwisata berkelanjutan saat ini cenderung bersifat multidimensi dan sistemik.

Dimensi ekologi menempati posisi sentral dalam pariwisata berkelanjutan karena aktivitas wisata sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Penurunan kualitas air, degradasi lanskap, dan hilangnya keanekaragaman hayati secara langsung menurunkan daya tarik destinasi dan mengancam keberlanjutan jangka panjang. Penelitian periode 2020–2025 menunjukkan bahwa destinasi wisata berbasis air dan lanskap buatan, termasuk kawasan sekitar bendungan, memiliki tingkat kerentanan ekologis yang tinggi. Tekanan tersebut umumnya berasal dari peningkatan kunjungan tanpa pengendalian daya dukung, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan ekologi menuntut adanya konservasi aktif, pengendalian kapasitas kunjungan, dan integrasi prinsip ekosistem dalam perencanaan wisata.

Keberlanjutan ekonomi dalam pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya kontribusi terhadap produk domestik regional atau peningkatan pendapatan daerah.

Pendekatan berkelanjutan menekankan kualitas distribusi manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja lokal, serta keterkaitan pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa destinasi yang bergantung pada investasi eksternal tanpa penguatan ekonomi lokal cenderung mengalami kebocoran ekonomi yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan pariwisata tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan ekonomi mensyaratkan keterlibatan usaha mikro dan kecil, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan rantai nilai lokal berbasis sumber daya wilayah.

Dimensi sosial dalam pariwisata berkelanjutan berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat, penerimaan sosial, dan keadilan antar kelompok. Penelitian terbaru menegaskan bahwa keberhasilan destinasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas atraksi, tetapi juga oleh hubungan harmonis antara wisatawan dan masyarakat lokal. Konflik sosial, marginalisasi kelompok tertentu, serta perubahan nilai sosial yang tidak terkendali menjadi indikator rendahnya keberlanjutan sosial. Pendekatan pariwisata berbasis komunitas sering dipandang sebagai solusi, namun studi empiris menunjukkan bahwa pendekatan ini hanya efektif apabila didukung oleh kapasitas masyarakat dan kerangka kelembagaan yang kuat.

Keberlanjutan kelembagaan menjadi dimensi yang semakin mendapat perhatian dalam kajian pariwisata berkelanjutan. Kelembagaan mencakup kebijakan, regulasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kapasitas organisasi pengelola destinasi. Penelitian 2020–2025 menunjukkan bahwa banyak kegagalan pariwisata berkelanjutan disebabkan oleh fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Pada destinasi yang berada di sekitar infrastruktur strategis seperti bendungan, kompleksitas aktor menjadi lebih tinggi karena melibatkan sektor sumber daya air, lingkungan, pariwisata, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberlanjutan kelembagaan menuntut integrasi kebijakan, kejelasan kewenangan, serta mekanisme kolaborasi yang efektif.

Dimensi teknologi berperan sebagai faktor pendukung sekaligus akselerator pariwisata berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan peningkatan efisiensi pengelolaan, transparansi data, serta promosi destinasi yang

lebih terarah. Studi mutakhir menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital, seperti sistem reservasi berbasis kapasitas dan pemantauan lingkungan, mampu menekan tekanan ekologis sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Namun, kesenjangan akses teknologi di tingkat lokal masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah berkembang. Oleh karena itu, keberlanjutan teknologi harus dipahami sebagai kemampuan destinasi dalam mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan lokal.

Berbagai model penilaian pariwisata berkelanjutan telah dikembangkan untuk mengukur tingkat keberlanjutan destinasi secara objektif. Model multidimensi yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi semakin banyak digunakan karena mampu menggambarkan kondisi destinasi secara komprehensif. Penelitian empiris menunjukkan bahwa hasil pengukuran keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar perumusan strategi pengembangan. Dengan mengetahui dimensi yang paling lemah, pemangku kepentingan dapat menentukan prioritas intervensi secara lebih tepat.

Pada wilayah yang mengalami pertumbuhan wisata di sekitar bendungan, pendekatan pariwisata berkelanjutan menjadi sangat relevan. Bendungan memberikan peluang ekonomi melalui wisata air dan lanskap, namun juga membawa risiko ekologis dan sosial. Oleh karena itu, pengembangan wisata di kawasan tersebut harus didasarkan pada tingkat keberlanjutan yang terukur dan terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan perumusan strategi pengembangan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah dan dinamika lokal.

Pariwisata berkelanjutan tidak hanya merupakan tujuan normatif, tetapi juga kerangka operasional dalam pengelolaan destinasi. Integrasi lima dimensi keberlanjutan memberikan dasar analitis yang kuat untuk menilai kinerja destinasi dan merumuskan strategi pengembangan yang kontekstual. Kerangka ini relevan untuk diterapkan pada tingkat kabupaten, khususnya pada wilayah yang mengombinasikan infrastruktur strategis dengan pengembangan wisata berbasis sumber daya alam.

2.7 Keberlanjutan Ekologi, Sosial Budaya, Ekonomi, Kelembagaan dan Teknologi

Yoeti (2008) mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan ekowisata dapat memberikan pengaruh pada berbagai aspek seperti lingkungan (ekologi), sosial budaya dan ekonomi.

2.7.1 Keberlanjutan Ekologi

Pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi adalah untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan berbasis lingkungan maka kita harus mampu memelihara sumberdaya agar tetap dalam keadaan stabil, menghindari terjadinya eksploitasi alam agar tumbuhan dapat melakukan fungsi penyerapan secara sempurna (Sidabutar, 2021). Selain itu pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi ekosistem lain yang tidak termasuk dalam sumberdaya ekonomi.

Menurut Damanik dan Weber (2006) kebijakan berkaitan dengan wisata dilandasi oleh dimensi ekologi yaitu:

- 1) Penentuan dan konsistensi pada daya dukung lingkungan,
- 2) Pengelolaan limbah dan pengurangan penggunaan bahan baku hemat energi,
- 3) Prioritas pengembangan produk dan layanan jasa berbasis lingkungan,
- 4) Peningkatan kesadaran lingkungan dengan kebutuhan konservasi.

2.7.2 Keberlanjutan Sosial-Budaya

Wisata harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati kelestarian nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat sekitar (Asriningrum 2009) yaitu:

- 1) Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pengembangan.
- 2) Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan wisata.
- 3) Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

- 4) Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan wisata
- 5) Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Keberlanjutan sosial-budaya mempunyai empat sasaran (Askar 2004) yaitu:

1. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
2. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.
3. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
4. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu: prioritas harus diberikan pada kegiatan sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa-kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

Keberlanjutan sosial budaya melibatkan peran aktif dari masyarakat yang saling berinteraksi. Proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat

dimana terdapat proses hubungan antar manusia berupa interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia secara terus-menerus. Proses sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu, kerjasama, persaingan, pertikaian atau pertentangan, dan akomodasi. Melalui interaksi masyarakat mampu bekerja sama untuk menjaga silaturahmi serta melaksanakan norma, nilai budaya dan tradisi di dalam kehidupan bermasyarakat.

2.7.3 Keberlanjutan Ekonomi

Pengembangan wisata harus benar-benar dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengelolaan yang cermat, tidak terjebak atau tergiur pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi harus berpedoman pada pengembangan berkelanjutan. Sebuah pembangunan ekonomi lokal memiliki keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan dan tidak mengandung ancaman terhadap modal alami dan buatan. Ekonomi yang adil secara sosial atau berhubungan dengan kerangka ekologi adalah ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan terhadap kegiatan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal tersebut menurut World Bank (1998) memfokuskan kepada:

1. Peningkatan kandungan lokal;
2. Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;
3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
4. Pembangunan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;
7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah;

10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

2.7.4 Keberlanjutan Kelembagaan

Kelembagaan merupakan suatu organisasi yang melakukan suatu usaha guna mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat dengan organisasi yang saling mengikat dan membentuk hubungan tertentu (Kuhaja, 2014). Hubungan yang mengikat dalam kelembagaan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial secara intensif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Kajian tentang kualitas kelembagaan mempunyai keterkaitan dengan keberhasilan sebuah kebijakan. Afonso dan Jales (2011) berpendapat bahwa kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita masyarakat khususnya masyarakat lokal. Kelembagaan ditingkat lokal yang didukung oleh komitmen dan kebijakan pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi keberlanjutan (Lunariana Lubis, Agus Wahyudi, 2022). Kelembagaan lokal adalah sebuah organisasi yang terbentuk dalam lokalitas tertentu untuk melayani kebutuhan anggotanya. *The Overseas Development Institute (ODI)* pun memaparkan pemahamannya mengenai lembaga lokal yakni sebagai grup individu dan organisasi yang membentuk bagian berdasarkan tatanan sosial masyarakat, serta memiliki struktur dan proses formal atau informal untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber dayanya. Lembaga-lembaga lokal bermacam-macam bentuknya seperti institusi pemerintah, organisasi nirlaba, organisasi bisnis, dan sebagainya. Tujuan utama lembaga lokal adalah untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan anggotanya (Aliim & Darwis, 2024).

Menurut Alimm & Darwis (2024), ada beberapa manfaat dan fungsi kelembagaan lokal bagi wilayah sekitarnya yaitu :

Fungsi pertama, kelembagaan lokal bisa membantu merealisasikan pembangunan sosial yang berkelanjutan melalui cara-cara yang memastikan bahwa masyarakat lokal mempunyai hak untuk bersuara dalam pengambilan keputusan atas berbagai layanan yang nantinya akan diberikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat

lokal. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan efektivitas kinerja, transparansi, serta partisipasi lembaga lokal.

Fungsi kedua, kelembagaan lokal dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Menurut *International Labour Organization (ILO)*, lembaga-lembaga lokal memegang peranan penting dalam mempromosikan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan. Lembaga lokal berperan untuk menciptakan pengembangan bisnis, memberikan dukungan dan pelatihan bagi pengusaha baru, dan mempromosikan investasi lokal.

Fungsi ketiga, kelembagaan lokal menjadi sarana untuk mempromosikan lingkungan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga lokal merupakan fondasi awal negara dalam mencapai poin-poin dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* khususnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Lembaga lokal bertugas mempromosikan manajemen sumberdaya yang berkelanjutan.

Fungsi keempat, lembaga lokal juga dapat meredakan konflik lokal. Lembaga lokal memiliki informasi mengenai sebab-sebab konflik lalu dapat menemukan solusinya. Kelembagaan lokal dapat mempromosikan resolusi konflik dengan cara menyatukan berbagai kelompok untuk saling berbagi pemahaman dan memecahkan permasalahan.

Dengan demikian, kelembagaan lokal mempunyai peran penting dalam pembangunan berkelanjutan dari berbagai bidang.

2.7.5 Keberlanjutan Teknologi

Dalam era globalisasi, pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan vital dalam menyediakan berbagai informasi yang relevan dan tepat waktu (Erlinnawati & Purwanto, 2024). Menurut Kamil, dkk (2024) globalisasi mengubah bebrbagai tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan ekonomi maka pemerintah memerlukan teknologi untuk mengatasi tantangan tersebut. Revolusi industri 4.0 mendorong kemajuan TIK yang

kemudian merubah manajemen diberbagai bidang. Teknologi mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

Teknologi digital dan keberlanjutan lingkungan menjadi hal yang penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan lingkungan ditandai dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pariwisata menjadi kebutuhan utama bagi para pengelola wisata terutama di desa dengan keragaman dan keunikan potensi yang dimilikinya (Jaelani, 2021). Menurut Vaishar & Stasna (2019) teknologi digital merupakan bagian dari infrastruktur cerdas untuk memecahkan persoalan yang terjadi didestinas wisata.

Sugandi (2020) dalam Jaelani & Hanim (2021) berpendapat bahwa keberlanjutan teknologi sangat dibutuhkan dalam pembangunan wisata berkelanjutan karena dapat mengoptimisasi konten promosi online, pengadaan sistem digital, perbaikan desa ramah lingkungan, peningkatan SDM, pengembangan kelembagaan yang berkualitas, perancangan paket wisata terintegrasi, pengadaan fasilitas teknologi sistem digital, dan peningkatan ramah lingkungan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis teknologi digital pada desa wisata harus berfokus pada penerapan standar berkelanjutan, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi.

2.8. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Sebelum membahas mengenai pariwisata berkelanjutan, maka akan dibahas terlebih dahulu tentang pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat di segala bidang untuk menuju kualitas hidup yang lebih baik (Pratama & Burhanuddin, 2019). Dalam implementasinya, pembangunan selalu berkaitan dengan proses perubahan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi

pembangunan untuk menjamin kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.

Strategi pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai kegiatan untuk mengintegrasikan pertimbangan ekonomi dan ekologi dalam pengambilan keputusan. Keduanya pada dasarnya terintegrasi dalam cara kerja dunia nyata. Hal ini membutuhkan perubahan sikap, tujuan, dan praktik kelembagaan di semua tingkatan (Chotim, 2020). Strategi pembangunan berkelanjutan juga bergerak dalam bidang pariwisata karena merupakan kolaborasi antara manusia dan alam sekitar.

Pengembangan wisata yang berkelanjutan adalah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengunjung dan masyarakat tempat tujuan wisata seraya merawat dan menumbuhkan potensi dimasa yang akan datang (Erlinnawati & Purwanto, 2024). Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kolaborasi antara manajemen, sumber daya, sosial, budaya, dan proses-proses ekologi dan juga diversitas ekosistem.

2.9. RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*)/MDS (*Multidimensional Scaling*)

RAPFISH merupakan tool atau teknik yang dikembangkan oleh tim dari Fisheries Center University of British Columbia untuk menentukan keberlanjutan perikanan (Pitcher, 1999., Pitcher dan Preikshot, 2001, Alder et al., 2000). Modifikasi RAPFISH untuk kasus daerah perlindungan laut (*Marine Protected Areas* atau *MPA*) kemudian dikembangkan oleh Alder et al., 2002. Dari sinilah aplikasi RAPFISH yang tidak secara langsung berhubungan dengan perikanan, dengan indikator yang berbeda untuk analisis MPA. Penggunaan RAPFISH kemudian menjadi populer setelah Kavanagh dan Pitcher (2004) mengembangkan Add-in program untuk Microsoft Excel sehingga memudahkan penggunaan RAPFISH dari sebelumnya yang menggunakan SPSS.

Prinsip RAPFISH adalah prinsip multi-criteria dengan algoritme *Multidimensional Scaling* (MDS), secara prinsip, MDS memetakan jarak persepsi antara satu unit dan unit lainnya dengan penyekalaan (*scaling*). RAPFISH dikembangkan melalui plat form software R yang bebas lisensi sehingga lebih praktis dan tidak harus dilakukan

dengan Microsoft Excel melalui perhitungan anchor secara manual. Pada program R, anchor telah dibuat secara otomatis sehingga pengguna tinggal memasukkan data melalui Microsoft Excel, kemudian analisis RAPFISH dilakukan secara otomatis oleh R. Untuk menggunakan RAPFISH dengan R diperlukan tahapan-tahapan sebagaimana digambarkan dibawah ini (Nawangsari & Ismaili, 2022).

RAPFISH dirancang untuk menilai status (derajat keberlanjutan) dari suatu sistem (dalam hal ini peri kanan) dalam skala keberlanjutan "bad" sampai "good". Penilaian ini mengandalkan pendekatan scoring dari atribut. Oleh sebab itu, titik kritis RAPFISH adalah pada atribut yang dipilih untuk diperingkat pada dimensi tertentu. Ketika konsensus terkait dengan skor di atas telah di capai dan sistem sudah berjalan stabil, penambahan dan pengurangan atribut relatif tidak akan mengubah secara fundamental pada ordinasi secara keseluruhan. Ordinasi RAPFISH ditempatkan pada kurva dua dimensi, di mana hanya dimensi horizontal (sumbu x) yang memiliki arti penting dalam ordinasi. Sumbu Y hanya memberikan variasi dalam atribut (indikator) dan "tidak" berhubungan sama sekali dengan derajat keberlanjutan. Sumbu Y dibuat secara "arbitrary" (arbitrer/manasuka) dan dihasilkan dari separuh skor "bad" (down) dan skor "good" (up) (Nawangsari, 2022).

RAPFISH bekerja sepenuhnya melalui algoritme ALSCAL MDS (Young, 2000; Schiffman et al., 1981). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa MDS (Multidimensional Scaling) merupakan jantung dari analisis RAPFISH. Dalam RAPFISH, MDS digunakan untuk "menobatkan" atau "mengordinasi" unit dalam skala "bad" dan "good", dengan cara mentransformasi multidimensional statistic (dalam hal ini unit-unit analisis dengan sekelompok atribut) ke dalam dimensi yang lebih rendah dengan tetap mempertahankan sifat-sifat "jarak" antara kasus yang dianalisis. Algoritme ALSCAL MDS kemudian membangkitkan skor unit dalam dua dimensi melalui formula berikut (Kavanagh dan Pitcher, 2004),

$$\mathcal{Z}\{S\} = D^2 + E$$

\mathcal{Z} menggambarkan transformasi monotonik, E adalah matriks resi dual (error), dan D adalah matriks Euclidian atau

$$D^2 = \sqrt{(Y_1 + Y_2)^2 + (Y_3 - Y_4)^2 + \dots}$$

$$D^2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y_j)^2} \quad i \neq j$$

Algoritme ALSCAL kemudian melakukan proses iterasi untuk me minimalkan eror E. Iterasi ini akan berhenti ketika "goodness of fit" yang diukur melalui s-stress mencapai nilai di bawah nilai minimum yang telah ditetapkan (yaitu 0.005) melalui:

$$S - \text{Stress} = (\text{Stress})^{1/2}$$

Di mana stress didefinisikan sebagai

$$\text{Stress} = \frac{||E||}{||\mathcal{Z}\{S\}||}$$

Simbol "double bar" atau ||.|| diartikan sebagai "jumlah kuadrat dari elemen yang ada dalam matriks" (dalam kasus di atas, matriks E dan $\mathcal{Z}\{S\}$).

Selain ordinasi, fitur penting yang disajikan oleh RAPFISH adalah Leveraging. Leveraging pada prinsipnya mendeteksi atribut dominan. Perhitungan leveraging memungkinkan kita untuk melihat perubahan ordinasi (posisi bad-good) ketika atribut-atribut tersebut satu per satu dikeluarkan. Jadi, jika status dari atribut atau indikator tersebut benar benar mencerminkan status unit yang kita nilai, atribut tersebut kurang lebih berkontribusi sama pada hasil akhir. Dalam RAPFISH, nilai leverage ini berkisar antara 2% sampai 6%, yang diukur dengan perubahan Root Mean Square (RMS).

Fitur ketiga dari RAPFISH adalah Monte-Carlo Analysis. Monte-Carlo Analysis dilakukan untuk mendeteksi sumber kesalahan (error) dari ke ragaman. Kavanagh dan Pitcher (2004) mengatakan bahwa kesalahan dalam RAPFISH bisa terjadi karena berbagai hal, antara lain:

a. kesalahan dalam penentuan skor atribut. Hal ini bisa terjadi karena ketidaksempurnaan pengetahuan tentang unit yang dianalisis, pemahaman yang

keliru terkait atribut dan skornya, perbedaan opini atau penilaian antara para pihak, dan kesalahan dalam entri data

b. konvergensi yang tidak sempurna dari MDS yang ditunjukkan oleh nilai stress yang tinggi, dan

c. atribut yang digunakan mungkin tidak tepat bagi unit yang di analisis.

2.10. Perspektif Gender

Gender dan pembangunan, peran perempuan dalam aktivitas menata, mengelola, dan merawat ruang sosial dan ekonomi telah lama menjadi perhatian utama. Teori pembagian peran gender (*gender role theory*) menjelaskan bahwa perempuan secara sosial dan kultural sering diasosiasikan dengan fungsi pengelolaan, pemeliharaan, dan pengaturan detail dalam kehidupan sehari-hari. Peran ini terbentuk melalui proses sosialisasi jangka panjang yang menempatkan perempuan sebagai pengelola rumah tangga, pengatur sumber daya keluarga, serta penjaga keharmonisan sosial (Eagly & Wood, 2016; revisited dalam konteks pembangunan berkelanjutan oleh Kabeer, 2020).

Dalam konteks pariwisata, karakteristik tersebut menjadikan perempuan memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan destinasi wisata, terutama pada skala lokal dan berbasis komunitas. Studi-studi pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebersihan, estetika, keteraturan, dan kenyamanan lingkungan, yang merupakan elemen penting dalam kualitas destinasi wisata (UNWTO, 2021; Cole et al., 2022). Kecenderungan ini menjelaskan mengapa perempuan banyak terlibat dalam pengelolaan homestay, ekowisata, wisata berbasis alam, dan atraksi budaya.

Teori care economy juga memberikan penjelasan penting terkait peran perempuan dalam pengelolaan pariwisata. Teori ini menekankan bahwa aktivitas perawatan, pengelolaan, dan pelayanan yang sering dilakukan perempuan memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan, meskipun kerap tidak diakui secara formal (Folbre, 2021). Dalam pariwisata, aktivitas seperti menata akomodasi, menjaga kebersihan destinasi, mengelola pelayanan wisatawan, serta merawat lingkungan

alam merupakan bagian dari ekonomi perawatan yang berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan destinasi.

Selanjutnya, pendekatan feminisme sosial dan feminisme pembangunan menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor pariwisata bukan semata karena sifat alamiah, tetapi juga karena kemampuan adaptif dan manajerial yang berkembang melalui pengalaman sosial. Perempuan dinilai lebih cermat dalam pengelolaan sumber daya terbatas, pengambilan keputusan berbasis konsensus, serta pengelolaan konflik sosial pada tingkat komunitas (Kabeer, 2020; Chant & Sweetman, 2021). Karakter ini sangat relevan dalam pengelolaan destinasi wisata yang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks ekowisata dan pariwisata berkelanjutan, teori ekofeminisme memberikan kerangka konseptual yang kuat. Ekofeminisme melihat adanya hubungan erat antara perempuan dan alam, di mana perempuan sering berperan sebagai penjaga dan pengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa destinasi wisata yang melibatkan perempuan sebagai pengelola utama cenderung lebih memperhatikan aspek daya dukung lingkungan, konservasi, dan keberlanjutan jangka panjang (Mies & Shiva, reinterpretasi modern dalam konteks pariwisata oleh Salleh, 2022).

Penelitian empiris periode 2020–2025 juga memperkuat argumen ini. Studi di berbagai desa wisata di Asia Tenggara menunjukkan bahwa perempuan pengelola wisata lebih konsisten dalam menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pembatasan jumlah pengunjung, serta pemeliharaan lanskap wisata (Putri et al., 2024; Wardhani & Susilowati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan perempuan dalam menata dan mengelola tidak hanya berdampak pada estetika, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis destinasi.

Dalam kaitannya dengan Kabupaten Pringsewu, kondisi ini menjadi sangat relevan mengingat banyak unit usaha wisata, seperti homestay, agrowisata, wisata alam, dan kuliner lokal, dikelola atau dioperasikan oleh perempuan. Peran perempuan sebagai pengelola lapangan, pengatur operasional harian, dan penjaga kualitas layanan berkontribusi langsung terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi dalam analisis keberlanjutan pariwisata. Namun, peran tersebut sering belum

diimbangi dengan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis dan struktur kelembagaan formal.

2.11. Strategi Pengembangan Wisata

Strategi pengembangan wisata merupakan proses perencanaan terstruktur yang bertujuan meningkatkan daya saing destinasi melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan. Strategi ini disusun berdasarkan kondisi internal destinasi, dinamika pasar wisata, serta kapasitas kelembagaan yang tersedia. Dalam pendekatan kontemporer, pengembangan wisata tidak lagi berorientasi pada peningkatan kuantitas kunjungan semata, tetapi menekankan kualitas pengalaman wisata, distribusi manfaat ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya (UNWTO, 2021).

Pengembangan wisata yang efektif menuntut penggunaan pendekatan berbasis data dan partisipasi pemangku kepentingan. Keputusan strategis harus didukung oleh informasi empiris yang diperoleh langsung dari wisatawan, masyarakat lokal, dan pengelola destinasi. Oleh karena itu, strategi pengembangan wisata umumnya dirumuskan melalui integrasi teori perencanaan strategis dengan metode pengumpulan data lapangan seperti kuesioner dan wawancara mendalam (Bramwell & Lane, 2022).

2.11.1. Konsep dan Tujuan Strategi Pengembangan Wisata

Strategi pengembangan wisata dapat didefinisikan sebagai seperangkat kebijakan dan tindakan terencana untuk mengelola sumber daya wisata agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan destinasi wisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan wisatawan (Sharpley, 2020).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa strategi yang fokus pada keunggulan utama destinasi memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan strategi yang mengembangkan seluruh aspek secara bersamaan tanpa prioritas yang jelas (Rasoolimanesh et al., 2022). Oleh karena itu, penentuan prioritas menjadi elemen

kunci dalam strategi pengembangan wisata, terutama pada destinasi dengan keterbatasan sumber daya.

2.11.2. Kuesioner dan Wawancara sebagai Dasar Perumusan Strategi

Kuesioner dan wawancara merupakan metode utama dalam pengumpulan data primer pada penelitian strategi pengembangan wisata. Kuesioner digunakan untuk mengukur persepsi wisatawan terhadap indikator utama destinasi seperti kualitas fasilitas, aksesibilitas, pelayanan, keamanan, dan tingkat kepuasan. Data kuantitatif ini memberikan gambaran objektif mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap pengalaman wisatawan (Chen & Chen, 2021).

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pengelola destinasi, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Wawancara membantu mengidentifikasi hambatan struktural, peluang pengembangan, serta kesiapan kelembagaan dalam mendukung strategi wisata (Hall & Williams, 2020). Kombinasi kuesioner dan wawancara menghasilkan basis data yang kuat untuk perumusan strategi pengembangan wisata yang realistis dan aplikatif.

2.11.3. Teori Pareto dalam Strategi Pengembangan Wisata

Teori Pareto atau Pareto Principle menyatakan bahwa sebagian besar hasil sering kali dihasilkan oleh sebagian kecil faktor penyebab. Prinsip ini dikenal luas sebagai aturan 80/20 dan banyak digunakan dalam manajemen strategis untuk menentukan fokus kebijakan yang paling berdampak (Koch, 2021).

Dalam pengembangan wisata, Teori Pareto digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keberhasilan destinasi. Hasil kuesioner dan wawancara biasanya menghasilkan banyak variabel penilaian. Namun, tidak semua variabel memiliki pengaruh yang sama. Melalui analisis Pareto, pengelola destinasi dapat menentukan sejumlah kecil faktor prioritas yang paling memengaruhi kepuasan wisatawan dan kinerja ekonomi destinasi (Zhang et al., 2023).

Sebagai contoh, beberapa studi menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas, kebersihan, dan kualitas atraksi sering kali menjadi faktor dominan yang

memengaruhi keputusan kunjungan dan kepuasan wisatawan. Fokus pada perbaikan faktor-faktor tersebut terbukti lebih efektif dibandingkan upaya peningkatan menyeluruh yang tidak terarah (Liu & Song, 2022).

2.11.4. Formulasi Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Prioritas

Formulasi strategi pengembangan wisata dilakukan melalui analisis kondisi internal dan eksternal destinasi. Analisis SWOT banyak digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi destinasi. Hasil analisis ini kemudian dipadukan dengan analisis Pareto untuk menentukan strategi prioritas yang paling berdampak (Phadermrod et al., 2020).

Strategi prioritas dapat berupa penguatan atraksi unggulan, peningkatan fasilitas inti, perbaikan sistem pengelolaan, atau optimalisasi promosi digital. Pendekatan berbasis prioritas memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi strategi (Ritchie & Crouch, 2021).

2.11.5. Evaluasi dan Keberlanjutan Strategi Pengembangan Wisata

Evaluasi strategi pengembangan wisata dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Indikator evaluasi meliputi tingkat kunjungan wisatawan, kepuasan wisatawan, kontribusi ekonomi, serta dampak sosial dan lingkungan. Evaluasi berbasis data memungkinkan penyesuaian strategi secara berkelanjutan sesuai dinamika destinasi (Bramwell et al., 2023).

Penerapan Teori Pareto dalam evaluasi membantu memastikan bahwa faktor prioritas yang ditangani benar-benar memberikan dampak signifikan. Dengan demikian, strategi pengembangan wisata dapat terus disempurnakan dan tetap relevan dalam jangka panjang.

2.12. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Analisis SWOT merupakan alat *strategic scanning* yang digunakan untuk memetakan kondisi internal dan eksternal suatu organisasi, program, atau wilayah,

dengan tujuan merumuskan arah strategi yang paling rasional. SWOT membagi informasi menjadi empat kelompok: Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) sebagai faktor internal, serta Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) sebagai faktor eksternal. Dalam konteks pembangunan wilayah dan pariwisata, SWOT bermanfaat karena mampu merangkum beragam isu—mulai dari kualitas daya tarik destinasi, infrastruktur, kelembagaan, hingga dinamika pasar wisata—ke dalam peta masalah yang mudah diturunkan menjadi strategi kebijakan. Secara historis, SWOT banyak diasosiasikan dengan tradisi *business policy* yang berkembang sejak dekade 1960-an untuk menilai kesesuaian antara kemampuan internal dan perubahan lingkungan eksternal, lalu memprioritaskan tindakan strategis. Dalam praktiknya, SWOT bukan sekadar “daftar faktor”, tetapi sebuah kerangka logika untuk menghubungkan diagnosis situasi dengan pilihan strategi. Untuk menjadikan SWOT lebih operasional, beberapa penulis mengembangkan pendekatan *matching* melalui matriks TOWS yang menekankan pencocokan faktor internal (S–W) dengan faktor eksternal (O–T) sehingga strategi yang dihasilkan lebih terarah (misalnya strategi SO, WO, ST, WT).

Dalam penelitian dan perencanaan pariwisata, SWOT sering digunakan karena pariwisata merupakan sektor yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal (tren wisata, daya beli, kompetisi destinasi, regulasi, isu keamanan, perubahan iklim) sekaligus bergantung pada kapasitas internal wilayah (aksesibilitas, amenitas, kualitas layanan, tata kelola, kualitas lingkungan destinasi). Studi mutakhir menunjukkan SWOT masih relevan untuk merumuskan strategi pengelolaan objek wisata menuju pariwisata berkelanjutan, terutama ketika SWOT dipadukan dengan data lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi) dan analisis yang sistematis.

Dari sisi prosedur, SWOT umumnya dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti/penyusun kebijakan menentukan unit analisis (misalnya destinasi tertentu, kawasan wisata, atau kabupaten). Kedua, dilakukan identifikasi faktor internal: kekuatan (misalnya daya tarik unik, lokasi strategis, jejaring komunitas, brand destinasi, kualitas produk wisata) dan kelemahan (misalnya akses jalan buruk, sanitasi minim, SDM layanan rendah, promosi lemah, tata kelola tidak konsisten). Ketiga, identifikasi faktor eksternal: peluang (misalnya tren wisata keluarga,

dukungan pemerintah, digitalisasi pemasaran, meningkatnya minat *nature-based tourism*) dan ancaman (misalnya degradasi lingkungan, bencana, kompetisi destinasi, konflik ruang, fluktuasi ekonomi). Keempat, faktor-faktor tersebut dipadukan ke dalam matriks strategi:

SO: memakai kekuatan untuk menangkap peluang,

WO: menutup kelemahan agar peluang bisa dimanfaatkan,

ST: memakai kekuatan untuk mengurangi ancaman,

WT: strategi defensif untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Namun, SWOT memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diantisipasi agar hasilnya tidak bersifat “subjektif daftar belanja”. SWOT rawan bias karena sangat bergantung pada persepsi informan atau penyusun analisis. Untuk meningkatkan reliabilitas, literatur menyarankan: (1) memperjelas definisi setiap faktor, (2) menggunakan data pendukung (statistik kunjungan, survei kepuasan, data lingkungan), (3) melibatkan pemangku kepentingan beragam (pemerintah, pengelola, pelaku UMKM, masyarakat, wisatawan), dan (4) memadukan SWOT dengan metode kuantitatif untuk pembobotan prioritas, misalnya AHP. Praktik penggabungan SWOT dengan alat prioritasasi membantu mengubah SWOT dari sekadar diagnosis menjadi peta jalan kebijakan yang dapat dieksekusi dan dievaluasi.

Dalam pembangunan wilayah, SWOT juga berguna untuk membaca keterkaitan pariwisata dengan tata ruang. Misalnya, “kekuatan” bisa berupa lanskap dan akses lintasan utama; “kelemahan” bisa berupa parkir sempit dan sanitasi; “ancaman” bisa berupa tekanan sempadan badan air dan konflik pemanfaatan ruang; sedangkan “peluang” bisa berupa dukungan kebijakan, pasar wisata keluarga, dan pengembangan ekonomi kreatif. Dari sini, strategi yang lahir seharusnya tidak berhenti pada promosi, melainkan mencakup pengaturan ruang kawasan, standar layanan, penguatan kelembagaan pengelola, dan mekanisme konservasi destinasi.

2.13. AHP (*Analytic Hierarchy Process*)

Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang membantu menyusun prioritas kebijakan atau alternatif

berdasarkan penilaian terstruktur. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty dan dikenal luas karena kemampuannya menggabungkan pertimbangan kualitatif (pendapat ahli/stakeholder) ke dalam bobot numerik yang konsisten. Dalam penelitian pembangunan wilayah dan pariwisata, AHP sangat berguna karena keputusan sering melibatkan banyak kriteria yang saling bersaing, misalnya antara peningkatan aksesibilitas, perlindungan lingkungan, pemerataan manfaat ekonomi, dan kualitas pengalaman wisata.

Inti AHP adalah membangun hirarki keputusan: tujuan di puncak, kriteria (dan subkriteria) di tingkat tengah, serta alternatif kebijakan/strategi di tingkat bawah. Setelah hirarki disusun, dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*): setiap kriteria dibandingkan dua-dua untuk menilai mana yang lebih penting dan seberapa kuat tingkat kepentingannya. Penilaian ini biasanya menggunakan skala Saaty (1–9), lalu dihitung bobot prioritas melalui proses matematika (*eigenvector*). Kelebihan penting AHP adalah adanya uji konsistensi melalui Consistency Ratio (CR) untuk memastikan penilaian tidak terlalu kontradiktif. Jika CR melewati ambang yang disarankan, penilai diminta meninjau ulang perbandingan yang tidak konsisten.

Dalam pariwisata berkelanjutan, AHP sering dipakai untuk: (1) menentukan prioritas pengembangan destinasi, (2) memilih lokasi atau kawasan unggulan, (3) memprioritaskan program (infrastruktur, SDM, pemasaran, konservasi), dan (4) menimbang trade-off antara aspek ekonomi–sosial–lingkungan. Studi-studi terbaru di Indonesia menunjukkan penggunaan AHP untuk memprioritaskan strategi pariwisata perkotaan berkelanjutan (misalnya pada kawasan metropolitan) maupun untuk penentuan destinasi berkelanjutan dengan kriteria lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Kekuatan AHP terletak pada dua hal. Pertama, AHP mampu membuat proses kebijakan lebih transparan karena bobot dan alasan prioritas dapat ditelusuri. Kedua, AHP mendukung pengambilan keputusan partisipatif; bobot dapat disusun dari gabungan penilaian beberapa ahli atau stakeholder sehingga mewakili perspektif yang lebih seimbang. Dalam konteks tata kelola destinasi, ini penting karena keberlanjutan memerlukan kesepakatan lintas aktor: pemerintah daerah,

pengelola destinasi, masyarakat, pelaku usaha, dan (bila mungkin) representasi wisatawan.

Namun, AHP juga memiliki keterbatasan. AHP bergantung pada kualitas panel ahli dan struktur kriteria. Jika kriteria disusun tidak tepat (misalnya tumpang tindih atau terlalu umum), bobot yang dihasilkan menjadi kurang bermakna. Selain itu, AHP bisa menjadi “formalitas angka” apabila data pendukung tidak digunakan untuk memeriksa hasil (misalnya data kualitas air, data sampah, data kepuasan wisatawan). Karena itu, praktik penelitian yang baik biasanya menggabungkan AHP dengan penguatan basis data: AHP memberi bobot prioritas, sementara data lapangan memberi validasi apakah prioritas tersebut logis dan sesuai kondisi.

Bagi penelitian pariwisata dalam pembangunan wilayah, AHP dapat digunakan untuk memprioritaskan strategi yang mengintegrasikan tata ruang: misalnya bobot untuk program pengendalian bangunan di zona sensitif, perbaikan akses dan parkir, penguatan pengelolaan sampah, pembentukan kelembagaan pengelola, dan pengembangan ekonomi kreatif. Dengan demikian, AHP membantu menjawab pertanyaan kebijakan yang sering muncul: “Program mana yang paling duluan dikerjakan agar dampaknya paling besar dan paling berkelanjutan

2.14. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/70/1 pada tahun 2015, berisi 17 tujuan dan 169 target untuk dicapai hingga tahun 2030. SDGs menekankan pendekatan yang terpadu: pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perlindungan lingkungan, serta penguatan tata kelola dan kemitraan. Dalam pembangunan wilayah, SDGs berfungsi sebagai “kompas” agar program daerah tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan antarkelompok.

SDGs merupakan program pembangunan internasional dengan 17 tujuan yang terbagi dalam 169 sasaran. Sasaran dan tujuan tersebut saling terkait, terhubung, terintegrasi satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang menyepakati agenda SDGs menunjukkan komitmen dan

keselarasan dalam pelaksanaan SDGs dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Untuk mengatasi isu-isu tersebut, disusunlah 17 tujuan SDGs sebagai berikut: (Badan Pusat Statistik, 2016)

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan pada empat prinsip, yaitu: 1) Layak secara ekonomi, yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; 2) Layak Lingkungan, yaitu tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan; 3) Diterima secara sosial, yaitu terpenuhinya hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan 4) Sesuai secara teknologi, yaitu menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi.

Pariwisata memiliki posisi strategis dalam SDGs karena karakter sektor ini lintas dimensi. Pariwisata dapat menciptakan pekerjaan (SDG 8), menggerakkan usaha lokal (SDG 1 dan 10 melalui peningkatan pendapatan), mendukung pelestarian budaya (SDG 11), dan mendorong konsumsi-produksi yang bertanggung jawab (SDG 12). Namun, pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif bila tidak dikelola: tekanan terhadap air dan energi (SDG 6 dan 7), peningkatan emisi (SDG 13), degradasi ekosistem darat/air (SDG 14 dan 15), serta konflik sosial dan ruang (SDG 16). Karena itu, SDGs membantu penelitian dan kebijakan pariwisata untuk menilai “dua sisi” pariwisata: kontribusi sekaligus risiko.

UN Tourism menegaskan keterkaitan pariwisata dengan pencapaian SDGs dan mendorong integrasi SDGs dalam kebijakan pariwisata melalui publikasi dan platform pembelajaran. Salah satu rujukan yang sering digunakan adalah *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030*, yang memetakan bagaimana pariwisata dapat berkontribusi pada berbagai tujuan SDGs dan memberikan rekomendasi arah kebijakan. Selain itu, terdapat *Tourism for SDGs*

Platform (T4SDGs) yang disiapkan sebagai ruang berbagi praktik baik, kemitraan, dan alat untuk mendorong implementasi SDGs melalui pariwisata.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan, menangani kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat Daerah sekitar (Green Ideas for Tourism for Europe, 2015). Prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dikemukakan oleh Amerta (2017), meliputi: 1) menjaga kualitas lingkungan; 2) memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan wisatawan; 3) menjaga hubungan antara pariwisata dan lingkungan; 4) menjaga keharmonisan antara masyarakat lokal dan lingkungan; 5) menciptakan kondisi dinamis yang disesuaikan dengan daya dukung; dan 6) semua pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam misi yang sama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Amerta, 2017). Pariwisata berkelanjutan diprogramkan dan dilaksanakan dengan menggunakan konsep pembangunan yang stabil dalam menanggapi kebutuhan generasi sekarang, tanpa menguras kapasitas generasi berikutnya, dengan cara yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan budaya masyarakat tuan rumah (Zolfaghari, 2010).

Dalam penelitian, SDGs dapat dipakai sebagai kerangka analisis dan evaluasi. Misalnya, ketika menilai pengembangan destinasi berbasis lanskap air (waduk/danau), peneliti dapat menghubungkan indikator lingkungan dengan SDG 6 (kualitas air dan sanitasi), SDG 12 (pengelolaan sampah dan praktik konsumsi bertanggung jawab), serta SDG 15 (perlindungan ekosistem darat). Jika penelitian fokus pada manfaat ekonomi lokal, indikatornya dapat dikaitkan dengan SDG 8 (pekerjaan layak), SDG 1 (pengurangan kemiskinan), dan SDG 10 (pengurangan ketimpangan). Sementara itu, aspek tata kelola—misalnya kepatuhan tata ruang, partisipasi publik, transparansi pengelolaan retribusi—dapat dikaitkan dengan SDG 16 (institusi yang efektif) dan SDG 17 (kemitraan).

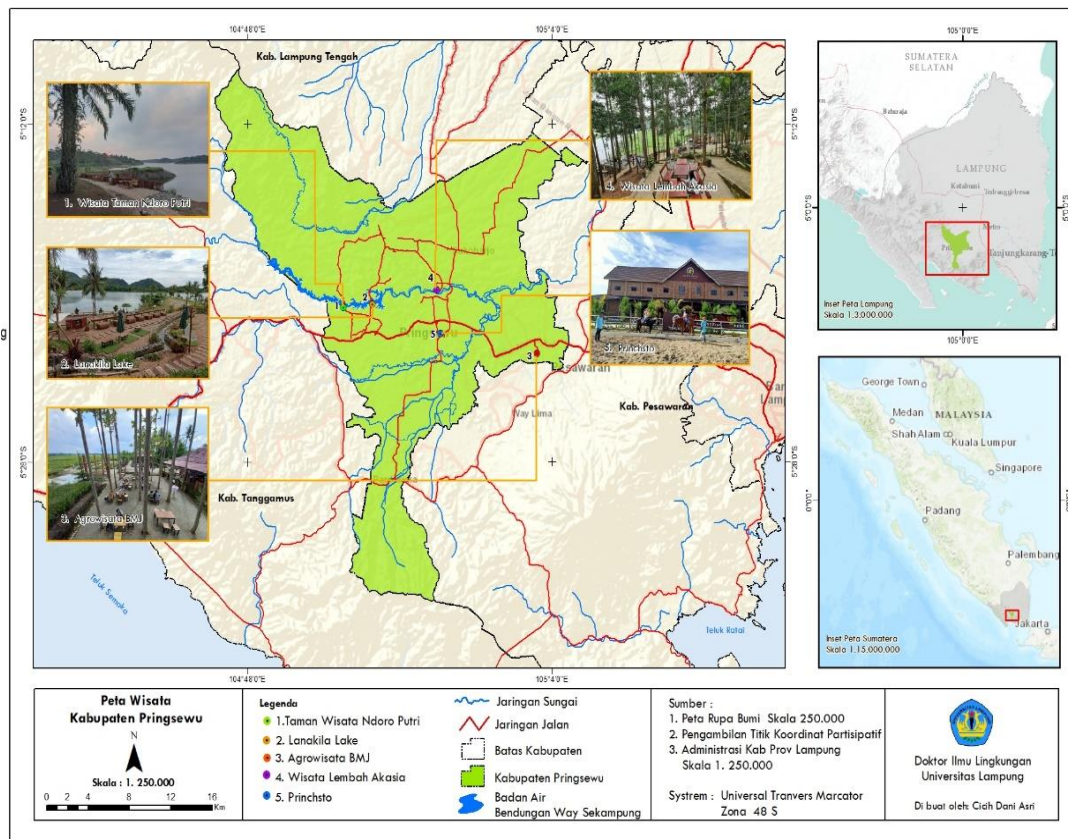
Kekuatan SDGs untuk pembangunan wilayah adalah kemampuannya menyatukan bahasa kebijakan lintas sektor. Bagi pemerintah daerah, SDGs dapat menjadi dasar *mainstreaming* agar pariwisata tidak berjalan sendiri, melainkan terhubung dengan

urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, UMKM/ekonomi kreatif, pendidikan/pelatihan SDM, dan tata ruang. Bagi peneliti, SDGs menyediakan kerangka yang memudahkan penyusunan indikator serta pembahasan implikasi kebijakan secara lebih terukur. Dengan demikian, penerapan SDGs dalam studi pariwisata tidak hanya bersifat normatif (“harus berkelanjutan”), tetapi dapat diwujudkan dalam indikator dan rekomendasi yang konkret sesuai kebutuhan wilayah.

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian keberlanjutan wisata dilakukan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan pada 5 lokasi objek wisata yaitu, Taman Wisata Ndoro Putri, objek wisata Lanakila Lake, Agrowisata BMJ, objek wisata Lembah Akasia, dan objek wisata Princhsto.



Gambar 11. Peta Lokasi Penelitian.

Luas wilayah Kabupaten Pringsewu sekitar 61.719 ha atau hanya 2 persen dari luas Provinsi Lampung. Pada awal pembentukan, wilayah administrasi Kabupaten

Pringsewu terdiri dari 8 kecamatan, 96 pekon dan 5 kelurahan. Selanjutnya pada Tahun 2013, jumlah kecamatan dan pekon telah dimekarkan menjadi 9 kecamatan, 126 pekon dan 5 kelurahan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari studi literatur dan data primer diperoleh melalui penelitian berbasis partisipasi masyarakat untuk metode menganalisis partisipasi komunitas dan keberlanjutan lintas dimensi institusi-ekologis, ekonomi, dan sosio-budaya, serta dimensi institusi-legal teknologi. Data keberlanjutan terdiri atas ekologi (lingkungan), ekonomi, institusi sosio-budaya-legal, dan teknologi.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi wisata dan area sekitarnya, serta melalui wawancara semiterstruktur (wawancara mendalam) dan wawancara terstruktur (survei). Selain itu, data primer dikumpulkan melalui diskusi (umum atau kelompok terfokus), kuesioner (mandiri yang sebagian besar dilakukan oleh pasien), observasi terstruktur, serta observasi partisipatif. Metode-metode ini digunakan untuk memperoleh kondisi yang realistis untuk setiap dimensi keberlanjutan, termasuk cara komunitas terlibat dalam pengendalian kawasan wisata.

Data sekunder juga penting untuk penelitian khusus ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen institusional melalui instansi pemerintah dan komunitas dalam bentuk studi literatur, artikel dari penelitian sebelumnya, statistik, laporan, atau publikasi ilmiah lainnya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan penelusuran dokumen dan sumber tertulis, termasuk laporan dari otoritas yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata, dokumen perencanaan dan kebijakan pariwisata, dokumen perencanaan tata ruang, statistik daerah. serta penelitian-penelitian sebelumnya lainnya yang diharapkan dapat mendukung analisis pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu. Tabel di bawah ini mengilustrasikan tujuan data, jenis data/sumber, serta pengumpulan data primer dan sekunder.

Tabel 4. Data yang Dibutuhkan dalam Penelitian

No	Tujuan	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Data Yang Dibutuhkan
1	Ekologi	Data Primer	Survei	1. Ketersediaan dan konservasi air 2. Pengelolaan limbah cair dan padat 3. Konservasi satwa liar (burung) 4. Sempadan sungai 5. Sempadan mata air
2	Ekonomi	Kuisisioner (<i>Purposive Sampling</i>) dan Data Sekunder	Survei	1. Penyerapan tenaga kerja 2. Potensi Pasar 3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 4. Kunjungan wisatawan 5. pendanaan dalam pemasaran dan promosi
3	Sosial	Kuisisioner (<i>Purposive Sampling</i>) Data Sekunder	Survei	1. Tingkat pendidikan formal 2. Pengetahuan Lingkungan dan Kearifan lokal 3. Potensi konflik pemanfaatan 4. Peran swasta 5. peran pemerintah daerah 6. Hospitality 7. Peran Kelompok Masyarakat
4	Kelembagaan	Kuisisioner (<i>Purposive sampling</i>) Data Sekunder/ Publikasi	Survei/Studi Literature	1. Ketersediaan Peraturan Pengelolaan 2. Pelaksanaan dan pengawasan 3. Tingkat Kepatuhan Masyarakat 4. Partisipasi Masyarakat 5. Koordiansi antar stakeholder
5	Teknologi	Kuisisioner (<i>Purposive sampling</i>) Data Sekunder/ Publikasi	Survei/Studi Literature	1. Transportasi 2. Promosi wisata 3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata.
6	Kondisi dan Potensi wisata	Data Primer/Data Sekunder	Survei/studi literatur	Potensi wisata lokasi penelitian di Kabupaten Pringsewu. Data terkait kecenderungan dan persepsi pengunjung terhadap pengembangan wisata.
7	Keberlanjutan	Data Primer/ Software Rappfish	Analisis MDS	1. Ekologi 2. Ekonomi 3. Sosial Budaya 4. Kelembagaan Hukum 5. Teknologi Infrastruktur
8	Strategi Pengembangan	Data Primer	Analisis Deskriptif	Data hasil kesesuaian dan data hasil keberlanjutan

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2025).

3.2.1 Teknik Penentuan Responden

Responden penelitian ini terdiri dari pengunjung wisata, masyarakat sekitar objek wisata, dan stake holder yang terdiri dai pengelola, aparat desa, dinas dan stakeholder terkiat lainnya

Penentuan sampel menurut Suharsimi A (2006) penentuan sampel jika populasi lebih besar dari 100 orang, pengambilan sampel 10-15%, jika populasi kkurang dari 100 orang maka dilakukan sensus secara keseluruhan.

Pada penelitian ini, yang menjadi lokus utamanya adalah tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu posisinya tersebar di 5 pekon yaitu Pekon Lugusari, Pekon Pamenang, Pekon Wonodadi, Pekon Pringsewu Selatan, dan Pekon Sukoharjo I. Responden yang ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini sekitar 275 orang yang terdiri dari penjunjung, masyarkat, pengelola, aparat desa dan pokdarwis.

Sementara itu, responden untuk pengembangan SWOT *stakeholder* sejumlah 25 orang dipilih secara sengaja atau biasa disebut dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik untuk memilih responden berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki oleh responden. Responden tersebut biasa disebut sebagai tokoh kunci (*key person*) yang mempunyai kemampun untuk memahami permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Responden dari stakeholder dalam penelitian ini merupakan OPD terkait pariwisata Kabupaten Peringsewu.

Jumlah reponden dalam penelitia ini adalah 300 respomden yang terdiri dari 100 pengjung wisata, 100 masyarakat dan 100 stakeholder terkait.

3.3 Analisis Data

3.3.1 Analisis Persepsi Pengunjung dan Masyarakat

Analisis persepsi pengunjung dan masyarakat di kawasan wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan cara deskriptif dari hasil kuisioner yang telah diisi oleh para responden. Data persepsi pengunjung yang akan diambil yaitu jumlah dan asal pengunjung wisata di tempat wisata Kabupaten Pringsewu, pola

perjalanan wisata, demografi pengunjung, dan tingkat kepuasan pengunjung. Sementara itu, data persepsi masyarakat yang akan diteliti meliputi kondisi sosial ekonomi dan budaya (sikap terhadap penerimaan, aspek kesehatan masyarakat, aspek budaya masyarakat, dan aspek pendidikan), kondisi lapangan pekerjaan, kondisi kelembagaan, serta kondisi sarana wilayah.

3.3.2 Analisis Kondisi Ekologi Pariwisata di Kabupaten Pringsewu

Analisis deskriptif yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan data-data yang dapat menjelaskan tentang pemanfaatan dan penggunaan air baku Bendungan Way Sekampung, energi pengendalian banjir, dan proses pengelolaan limbah padat atau cair dari wisata-wisata di Kabupaten Pringsewu.

3.3.3 Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Wisata di Kabupaten Pringsewu

Metode analisis data menggunakan pendekatan analisis keberlanjutan yakni metode MDS dengan penggunaan *Software Rappfish*. Analisis keberlanjutan dilakukan dengan pendekatan analisis MDS (*Multi-Dimensional Scaling*) dengan bantuan *software Rappfish*. *Rappfish* (*Rapid Appraisal for Fisheries*), yang dikembangkan oleh Pitcher (1999) dan Pitcher and Preikshot (2001). Pendekatan ini lebih didasarkan pada prinsip *Multi Criteria Analysis* (MCA) dengan mengandalkan algoritma yang disebut sebagai algoritma MDS (Fauzi dan Anna, 2005).

MDS adalah teknik *multi-disciplinary rapid appraisal* untuk mengetahui tingkat keberlanjutan dari pembangunan wilayah yg responsif gender berdasarkan sejumlah atribut yang mudah diskoring. MDS, selain merupakan salah satu metode “*multivariate*” yang dapat menangani data metrik (skala ordinal) maupun nominal), juga merupakan teknik statistik yang mencoba melakukan transformasi multi dimensi ke dalam dimensi lebih rendah (Fauzi dan Anna, 2005).

Berikut ini merupakan tahapan operasional analisis keberlanjutan sebagaimana mengacu pada pedoman operasional *Software Rappfish*. Tahapan analisis meliputi langkah-langkah:

1. Identifikasi dan Penentuan Dimensi-Atribut

Penentuan dimensi yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan wisata disekitar Bendungan Way Sekampung yang ditentukan berdasarkan pada telaah regulasi dan studi literatur. Diperoleh 5 dimensi atribut yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan wisata di Kabupaten Pringsewu yaitu ekologi (5 atribut), ekonomi (5 atribut), Sosial Budaya (7 atribut), kelembagaan/hukum (5 atribut), dan infrastruktur/teknologi (4 atribut).

Analisis keberlanjutan dengan teknik Rap-Multidimensi dimulai dengan meninjau ulang, mengidentifikasi, dan mendefinisikan atribut partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan wisata di Kabupaten Pringsewu.

2. Penentuan Nilai Setiap Atribut

penilaian terhadap atribut berdasarkan pada penilaian setiap dimensi yang diberikan skor yang menggambarkan kondisi keberlanjutan dimensi-dimensi yang akan dikaji. Penilaian akan bergantung pada studi pustaka, pendapat atau argumen dari para stakeholder, serta scientific judgment peneliti tentang skor buruk (bad) dan baik (good) pada skala ordinal. Skor nilai buruk mencerminkan kondisi paling tidak menguntungkan dan skor baik untuk mencerminkan kondisi yang paling menguntungkan. Mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh Good et al., (1999) dalam Laapo (2010), maka jumlah peringkat yang diberikan secara konsisten pada setiap atribut yang dievaluasi sebanyak 3 (tiga) yaitu buruk diberi skor 0 (nol), antara diberi skor 1 (satu) dan baik diberi skor 2 (dua).

Tabel 5. Dimensi dan Atribut Keberlanjutan Wisata

No	Dimensi dan Atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria penilaian
A. EKOLOGI					
1	Ketersediaan dan konservasi air	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak ada (1) Kurang tersedia (2) Tersedia (3) Sangat tersedia
2	Pengelolaan limbah padat dan limbah cair	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik

No	Dimensi dan Atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria penilaian
3	Konservasi satwa liar (Burung)	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
4	Sepadannya sungai	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
5	Sepadannya mata air	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
B. EKONOMI					
1	Penyerapan Tenaga Kerja	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
2	Potensi Pasar	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak ada (1) Lokal (2) Antar kota (3) Nasional
3	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat Baik
4	Pendanaan dalam pemasaran promosi	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak ada (1) Kurang (2) Cukup (3) Sangat Cukup
5	Kunjungan Wisatawan	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak ada (1) Kurang (2) Banyak (3) Sangat Banyak
C. SOSIAL					
1.	Tingkat Pendidikan Formal	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
2	Pengetahuan lingkungan dan kearifan lokal	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak Paham (1) Kurang Paham (2) Paham (3) Sangat Paham
3	Potensi konflik pemanfaatan	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak aman (1) Kurang aman (2) Aman (3) Sangat aman
4	Peran Pemenintah Daerah	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak ada (1) Kurang berperan (2) Berperan (3) Sangat berperan

No	Dimensi dan Atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria penilaian
5	Peran Swasta	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak ada (1) Kurang berperan (2) Berperan (3) Sangat berperan
6.	Peran Kelompok Masyarakat	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak ada (1) Kurang berperan (2) Berperan (3) Sangat berperan
7.	Hospitality	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
D. KELEMBAGAAN					
1	Ketersediaan Peraturan Pengelolaan	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak ada (1) Kurang tersedia (2) Tersedia (3) Sangat tersedia
2	Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
3	Kebijakan Layanan Publik	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
4	Partisipasi Masyarakat	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
5	Koordinasi antar stakeholder	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
E. TEKNOLOGI					
1	Tranportasi	0,1,2,3	3	0	(0) Buruk (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik
2	Informasi dan Promosi melalui media sosial	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak tersedia (1) Kurang tersedia (2) Tersedia (3) Sangat tersedia
3	Sarana dan Prasarana pendukung	0,1,2,3	3	0	(0) Tidak mendukung (1) Kurang mendukung (2) Mendukung (3) Sangat Mendukung

3.3.4. Strategi Pengelolaan secara Berkelanjutan

Dalam penelitian ini, analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) dan analisis prioritas dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) 2 metode ini digunakan untuk menentukan strategi pengelolaan berkelanjutan untuk Pariwisata Kabupaten Pringsewu.

Analisis SWOT

Proses analisis SWOT dengan mengidentifikasi faktor internal dibandingkan dengan faktor eksternal yang ada (Tabel 4). Analisis SWOT sendiri digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dan menggunakan logika untuk membuat strategi dengan memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), dan secara bersamaan meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) (Rangkuti 1998).

Tabel 6. Matriks SWOT

	<i>Opportunities (O)</i>	<i>Threats (T)</i>
<i>Strengths (S)</i>	Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil kesempatan yang ada	Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang dihadapi
<i>Weakness (W)</i>	Mendapatkan keuntungan dari kesempatan yang ada untuk mengatasi kelemahan-kelemahan	Meminimumkan kelemahan dan menghindari ancaman yang ada

Tahapan kerja analisis SWOT menurut Rangkuti (1998) yaitu:

1. Analisis faktor internal (SW) dan faktor eksternal (OT) dengan skala likert (Kinneer dan Taylor 1991) Untuk mencapai tujuan ini, identifikasi faktor internal dan eksternal diperlukan. Faktor internal dan eksternal ini dapat diidentifikasi melalui wawancara dengan pengelola, tokoh masyarakat, dan dinas yang relevan.
2. Menentukan bobot strategis dengan menggunakan metode perbandingan pasangan (Kinneer dan Taylor 1991)

Pemberian bobot diberikan berdasarkan seberapa penting pengelolaan lanskap. Pemberian tingkat kepentingan dilakukan kepada setiap faktor dengan 1 = tidak penting, 2 = kurang penting, 3 = penting, dan 4 = sangat penting. Bobot yang diberikan dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting) (Kinneer dan Taylor 1991). Rangkuti (1998) mengatakan bahwa nilai peringkat elemen positif (*strength and opportunities*) dan elemen negatif berbeda. Setelah menghitung tingkat signifikansi dari elemen strategi internal dan eksternal, pembobotan dilakukan dengan menggunakan metode *paired comparison* (perbandingan berpasangan) dengan penjelasan sebagai berikut (David dan Fred 2008):

- a. bobot 1 jika indikator faktor horizontal kurang penting dari indikator faktor vertikal;
- b. bobot 2 jika indikator faktor horizontal sama penting dengan indikator faktor vertikal;
- c. bobot 3 jika indikator faktor horizontal lebih penting dari indikator faktor vertikal;
- d. bobot 4 jika indikator faktor horizontal sangat lebih penting dari faktor vertikal.

Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan pembagian nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel (Kinneer dan Taylor 1991):

$$a_i = \frac{x_i}{\sum_i^n x_i}$$

Keterangan:

a i = bobot variable ke-i

x_i = nilai variable ke-i

i = 1,2,3,...,n

n = jumlah variabel

3. Membuat matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluatio* (EFE)

Tahapan ini meliputi nilai peringkat yaitu faktor positif (kekuatan dan peluang) berbanding terbalik dengan faktor negatif (kelemahan dan ancaman). Hasil skor yang diperoleh dapat mengetahui posisi tapak terletak pada bagian kuadran pada matriks internal-eksternal (IE) yang menyatakan kekuatan dan kelemahan. Matriks IE (Gambar 4) memiliki sembilan kuadran

dan dapat dibagi menjadi tiga bagian yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian sebagai berikut:

- a) *Grow and build strategy* (Bagan I, II, dan IV), fokus strategi ini adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk yang bersifat intensif dan agresif.
- b) *Hold and maintain strategy* (Bagan III, V, dan VII), fokus strategi ini adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk.
- c) *Harvest and divest strategy* (Bagan VI, VIII, dan IX), fokus strategi ini adalah perlunya manajemen biaya yang agresif saat biaya peremajaan bisnis untuk merevitalisasi bisnis tergolong rendah

TOTAL SKOR IFE

	4,0	KUAT	3,0	SEDANG	2,0	LEMAH	1,0
TOTAL SKOR EFE	4,0	I	II				
	3,0	IV	V				
	2,0	VII	VIII				
	1,0						

Gambar 12. Matriks Internal-Eksternal (IE).

4. Menentukan alternatif strategi

Matriks SWOT, yang berisi strategi potensial, digunakan untuk menentukan strategi alternatif. Empat jenis strategi berkembang, menurut David dan Fred (2008):

- a) Strategi SO, yang menggunakan seluruh kekuatan untuk mengambil peluang sebesar-besarnya;
- b) Strategi ST, yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;

- c) Strategi WO, yang mengambil keuntungan dari peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan; dan
- d) Strategi WT, yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Analisis AHP (Analytic Hierarchy Process)

Tahapan AHP dalam penelitian ini meliputi: (1) menyusun struktur hirarki keputusan yang terdiri atas tujuan penelitian (penentuan prioritas strategi), kriteria penilaian (misalnya lingkungan, ekonomi lokal, sosial, infrastruktur/aksesibilitas, dan tata kelola), serta alternatif strategi yang dihasilkan dari SWOT; (2) mengumpulkan data melalui kuesioner perbandingan berpasangan (pairwise comparison) kepada responden ahli/pemangku kepentingan yang dipilih secara purposif; (3) menghitung bobot prioritas setiap kriteria dan bobot alternatif pada masing-masing kriteria melalui normalisasi matriks/eigenvector; (4) melakukan uji konsistensi penilaian menggunakan Consistency Ratio (CR), dengan ketentuan penilaian dinyatakan konsisten apabila $CR \leq 0,10$; dan (5) mengalikan bobot kriteria dengan bobot alternatif untuk memperoleh nilai prioritas global, sehingga dihasilkan peringkat akhir strategi dari yang paling prioritas hingga yang paling rendah.

Dengan integrasi SWOT–AHP ini, strategi yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi memiliki dasar kuantitatif berupa bobot prioritas, sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis keberlanjutan dan analisis SWOT terhadap pengembangan wisata Kabupaten Pringsewu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wisata di Kabupaten Pringsewu memiliki potensi yang baik namun masih memerlukan penguatan pada beberapa dimensi kunci untuk mencapai keberlanjutan yang optimal.

1. Keberlanjutan Pariwisata Berdasarkan Lima Dimensi

Analisis RAP-Tourism menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan pariwisata Kabupaten Pringsewu berada pada kategori cukup berkelanjutan.

- a) Dimensi ekologi memiliki kinerja tertinggi dengan nilai 72,13, yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan relatif terjaga, terutama dipengaruhi oleh pengelolaan sempadan sungai sebagai faktor leverage utama.
- b) Dimensi ekonomi memperoleh nilai 67,41, dengan faktor pengungkit utama berupa perkembangan industri pendukung pariwisata yang belum merata antar destinasi.
- c) Dimensi sosial menjadi dimensi terlemah dengan nilai 54,37, yang dipengaruhi oleh potensi konflik pemanfaatan ruang dan rendahnya partisipasi masyarakat.
- d) Dimensi kelembagaan memiliki nilai 65,10, dengan leverage utama pada kebijakan dan kualitas layanan publik yang belum optimal di seluruh destinasi.
- e) Dimensi infrastruktur dan teknologi menunjukkan nilai 67,57, dengan faktor pengungkit utama berupa aksesibilitas dan transportasi menuju lokasi wisata.

2. Hubungan Antar Dimensi Keberlanjutan dalam Pengembangan Pariwisata

a) Keterkaitan antar dimensi keberlanjutan

Hubungan antar dimensi keberlanjutan pariwisata di Kabupaten Pringsewu bersifat saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Kinerja satu dimensi sangat dipengaruhi oleh kondisi dimensi lainnya dalam sistem pengelolaan pariwisata.

b) Peran dimensi ekologi sebagai prasyarat utama

Dimensi ekologi menunjukkan kondisi yang relatif kuat dan menjadi fondasi utama keberlanjutan destinasi. Namun, kekuatan ekologi tidak secara otomatis meningkatkan kinerja pariwisata tanpa dukungan dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan infrastruktur teknologi.

c) Keterkaitan dimensi ekonomi dengan infrastruktur dan teknologi

Dimensi ekonomi memiliki hubungan langsung dengan dimensi infrastruktur dan teknologi, terutama melalui aksesibilitas transportasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Kedua aspek ini berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, efisiensi pengelolaan, dan aktivitas ekonomi lokal.

d) Peran pengendali dimensi sosial dan kelembagaan

Dimensi sosial dan kelembagaan berfungsi sebagai faktor pengendali yang menentukan pemerataan manfaat ekonomi dan ekologis. Tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas kelembagaan memengaruhi keberlanjutan pengelolaan destinasi secara jangka panjang.

e) Implikasi hasil *leverage analysis*

Hasil *leverage analysis* menunjukkan bahwa kelemahan pada satu dimensi dapat menurunkan kinerja dimensi lainnya. Potensi konflik pemanfaatan ruang pada dimensi sosial berisiko mengganggu stabilitas pengelolaan dan menurunkan kualitas lingkungan.

f) Pengaruh kebijakan dan koordinasi kelembagaan

Lemahnya kebijakan layanan publik dan koordinasi antar lembaga berpotensi menghambat implementasi program pengelolaan lingkungan, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan destinasi wisata.

g) Kebutuhan pendekatan terintegrasi

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu memerlukan pendekatan lintas dimensi yang terintegrasi, dengan penekanan pada penguatan dimensi sosial dan kelembagaan sebagai pengungkit utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem pariwisata.

3. Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Prioritas Implementasi

a) Posisi Strategis Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan AHP, pengembangan pariwisata Kabupaten Pringsewu berada pada posisi *Growth and Build*. Posisi ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan agresif berbasis keberlanjutan merupakan pendekatan yang paling tepat untuk meningkatkan daya saing destinasi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya.

b) Dasar Penentuan Prioritas Strategi

Prioritas strategi ditetapkan berdasarkan bobot global hasil analisis AHP. Bobot tersebut mencerminkan tingkat urgensi dan kontribusi masing-masing strategi terhadap keberlanjutan pariwisata secara menyeluruh.

c) Strategi S–O sebagai Prioritas Utama

Strategi S–O memiliki bobot tertinggi dan menjadi prioritas utama pengembangan. Strategi ini menekankan pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal.

[1]Prioritas tertinggi adalah pengembangan ekowisata berbasis daya dukung lingkungan, yang dinilai paling efektif karena mampu menjaga kualitas ekologi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi destinasi.

[2]Prioritas berikutnya adalah digitalisasi promosi dan pengelolaan destinasi, yang berperan dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas destinasi, dan mendukung efisiensi manajemen pariwisata.

d) Strategi S–T sebagai Prioritas Kedua

Strategi S–T menempati prioritas kedua dan berfungsi sebagai strategi mitigatif.

[1] Fokus utama strategi ini adalah pengendalian dampak lingkungan berbasis daya dukung, yang bertujuan mengurangi risiko degradasi lingkungan akibat aktivitas wisata.

[2] Diferensiasi produk wisata menjadi strategi pendukung untuk menjaga daya saing destinasi dalam menghadapi persaingan antar wilayah.

e) Strategi W–O sebagai Prioritas Menengah

Strategi W–O diarahkan untuk memperbaiki kelemahan internal melalui pemanfaatan peluang eksternal.

Strategi kunci pada kelompok ini adalah digitalisasi manajemen destinasi, yang mendukung efektivitas tata kelola dan pelayanan wisata.

Peningkatan kapasitas SDM pariwisata menjadi elemen penting untuk memperkuat kualitas layanan, profesionalisme pengelola, dan daya saing destinasi.

f) Strategi W–T sebagai Prioritas Jangka Panjang

Strategi W–T merupakan strategi defensif dengan prioritas jangka panjang.

Fokus utama adalah penguatan tata kelola lintas sektor, guna meningkatkan koordinasi dan konsistensi kebijakan pengembangan pariwisata. Diversifikasi atraksi wisata non-musiman diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada musim kunjungan dan menjaga stabilitas ekonomi destinasi.

g) Urutan Prioritas Strategi Pengembangan

Secara keseluruhan, urutan prioritas strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

[1] Pengembangan ekowisata berbasis daya dukung lingkungan.

[2] Pengendalian dampak lingkungan dan mitigasi risiko.

[3] Digitalisasi promosi dan pengelolaan destinasi.

[4] Peningkatan kapasitas SDM dan partisipasi masyarakat.

[5] Penguatan tata kelola dan diversifikasi produk wisata.

h) Implikasi Implementasi Strategi

Struktur prioritas ini menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata Kabupaten Pringsewu harus dibangun melalui keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, penguatan sosial, dan efektivitas

kelembagaan, dengan tahapan implementasi yang disesuaikan dengan horizon waktu pengembangan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis keberlanjutan dan SWOT terhadap pengembangan wisata Kabupaten Pringsewu, beberapa saran untuk Penelitian lanjutan sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan analisis keberlanjutan pariwisata dengan pendekatan multidimensi yang lebih terintegrasi untuk memperkuat pemahaman hubungan antar dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi.
2. Diperlukan penggunaan metode analisis lanjutan untuk menguji hubungan kausal antar dimensi keberlanjutan serta memperkuat validitas penentuan strategi pengembangan pariwisata.
3. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas unit analisis pada tingkat destinasi atau desa wisata agar rekomendasi yang dihasilkan lebih spesifik dan operasional.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis keberlanjutan, leverage analysis, serta integrasi metode SWOT dan AHP, rekomendasi kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Pringsewu, sebagai berikut.

1. Penetapan Ekowisata Berbasis Daya Dukung sebagai Kebijakan Inti Destinasi
Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan pengembangan ekowisata berbasis daya dukung lingkungan sebagai arah utama pengelolaan destinasi. Kebijakan ini harus diwujudkan melalui penataan zonasi kawasan wisata, perlindungan sempadan sungai sebagai atribut ekologi kunci, serta pembatasan aktivitas wisata yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.
2. Penguatan Sistem Pengendalian Dampak Lingkungan Destinasi Wisata
Mengingat dimensi ekologi menjadi pengungkit utama keberlanjutan,

diperlukan kebijakan pengendalian dampak lingkungan yang lebih tegas melalui penerapan standar pengelolaan limbah, pengawasan pemanfaatan sumber daya air, dan integrasi analisis daya dukung dalam setiap perencanaan pengembangan destinasi.

3. Percepatan Digitalisasi Promosi dan Manajemen Destinasi Wisata

Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi pariwisata digital terintegrasi yang mencakup promosi destinasi, manajemen kunjungan, dan informasi fasilitas. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat dimensi ekonomi dan infrastruktur teknologi, khususnya pada destinasi dengan aksesibilitas fisik yang masih terbatas.

4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengelolaan Wisata Berbasis Masyarakat

Berdasarkan lemahnya dimensi sosial, kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi pariwisata, serta penguatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Pendekatan wisata berbasis masyarakat dipandang penting untuk mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang dan meningkatkan pemerataan manfaat ekonomi.

5. Penguatan Tata Kelola dan Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata

Untuk mengatasi kelemahan kelembagaan, diperlukan kebijakan pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, desa, swasta, dan komunitas wisata. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas layanan publik, konsistensi regulasi, serta keberlanjutan implementasi strategi pengembangan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani, T. F. H. (2021). Teknologi digital, keberlanjutan lingkungan, dan desa wisata di Indonesia. *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(2), 237–244.
- Alder, J., Pitcher, T. J., Preikshot, D., Kaschner, K., & Ferriss, B. (2000).
- Alder, J., Zeller, D., Pitcher, T. J., & Sumaila, U. R. (2002). A method for evaluating marine protected area management. *Fish and Fisheries*, 3(4), 317–337. <https://doi.org/10.1046/j.1467-2979.2002.00088.x>
- Aliim, T. F., & Darwis, R. S. (2024). Peran Kelembagaan Lokal dalam Pendayagunaan Sumber Daya Desa Wisata. *Social Work Journal*, 13(2), 248–258.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arsyad, S. (2010). *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: IPB Press.
- Ashley, C., & Roe, D. (2002). Making tourism work for the poor: Strategies and challenges in Southern Africa. *Development Southern Africa*, 19(1), 61–82. <https://doi.org/10.1080/03768350220123854>
- Babbitt, M. T., & Guha, M. (2022). Leveraging Community Engagement for Sustainable Tourism. *Sustainability Journal*, 14(4), 1405.
- Bakri, S, Ashaf, A.F, dkk (2022) Pengembangan Jasa Ekowisata Berkelanjutan: Startegi Mengelak Kutukan Sumberdaya Alam. Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA.
- Bayu Pratama, Burhanuddin, S. (2019). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten. *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 7(2), 276–285.
- Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. Routledge.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421.
- Bramwell, B., Higham, J., Lane, B., & Miller, G. (2017). Twenty-five years of sustainable tourism and the *Journal of Sustainable Tourism*: Looking back

- and moving forward. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(1), 1–9. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1251689>
- Buckley, R. (2011). Tourism and environment. *Annual Review of Environment and Resources*, 36, 397–416. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-041210-132637>
- Buckley, R. (2022). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 92, 103329.
- Buckley, R. C., & Underdahl, S. (2023). Tourism and environment: Ecology, management, economics, climate, health, and politics. *Sustainability*, 15(21), 15416. <https://doi.org/10.3390/su152115416>
- Burns, P. M., & Holden, A. (1995). *Tourism: A new perspective*. Prentice Hall.
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25. <https://doi.org/10.1080/14616689908721291>
- Butler, R. W. (2020). Tourism and resilience: Individual, organisational and destination perspectives. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(7), 879–897. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1689584>
- Damanik, J., & Weber, H. (2006). *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan ekowisata: Dari teori ke aplikasi*. ANDI.
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2020). Power in community-based tourism: Empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2352–2370. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1838527>
- Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C., & Scott, N. (2009). Destination and enterprise management for a tourism future. *Tourism Management*, 30(1), 63–74. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.04.002>
- Eagly, A. H., & Wood, W. (2016). Social role theory of sex differences. In *The Wiley Blackwell encyclopedia of gender and sexuality studies*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss183>
- Eagly, A. H., & Wood, W. (2016). Social role theory of sex differences. In *The Wiley Blackwell encyclopedia of gender and sexuality studies*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss183>
- Erlinnawati, A., & Purwanto, E. (2024). Peran Teknologi dan Komunikasi dalam Manajemen Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 1(4), 1–11.
- Fandeli, C., & Mukhlison. (2000). *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.
- Fauzi, A. (2019). *Teknik analisis keberlanjutan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Fauzi, A., & Anna, S. (2005). *Pemodelan sumber daya perikanan dan kelautan untuk analisis kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Federation of Nature and National Parks of Europe. (1993). *Loving them to death? Sustainable tourism in Europe's nature and national parks*. Grafenau, Germany: Federation of Nature and National Parks of Europe.
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441–473.
- Font, X., Torres-Delgado, A., Crabolu, G., Palomo Martinez, J., Kantenbacher, J., & Miller, G. (2021). The impact of sustainable tourism indicators on destination competitiveness: The European Tourism Indicator System. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(7), 1608–1630. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1910281>
- Font, X., Torres-Delgado, A., Crabolu, G., Palomo Martinez, J., Kantenbacher, J., & Miller, G. (2021). The impact of sustainable tourism indicators on destination competitiveness: The European Tourism Indicator System. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(7), 1608–1630. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1910281>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Fu, M., Luo, Z., Feng, L., & Que, X. (2023). Water productivity maximization and ecosystem monitoring to estimate tourism economic value. *Water Supply*, 23(11), 4672–4681. <https://doi.org/10.2166/ws.2023.262>
- Gössling, S. (2021). Tourism, technology and ICT: A critical review of affordances and concessions. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(5), 733–750. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1873353>
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>
- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188.
- Hall, C. M., Scott, D., & Gössling, S. (2023). *Tourism and sustainability: Issues, principles and challenges* (3rd ed.). London: Routledge.
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. London: Macmillan.
- Himmarielda Nawangsari, A. F. I. (2022). Analisis Keberlanjutan Trans Jogja melalui Metode Multi-Dimensional Scaling (MDS) Raffles. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(3), 222–234. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i3.34771>
- Honey, M. (2008). *Ecotourism and Sustainable Development*. Washington DC: Island Press.

- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Kabeer, N. (2020). Women's empowerment and economic development: A feminist critique of storytelling practices in "randomista" economics. *Feminist Economics*, 26(2), 1–26. <https://doi.org/10.1080/13545701.2020.1743338>
- Kavanagh, P., & Pitcher, T. J. (2004). Implementing Microsoft Excel software for Rapfish: A technique for the rapid appraisal of fisheries status. *Fisheries Centre Research Reports*, 12(2), 1–75.
- Kaynak, E., & Hartley, S. W. (2005). Applying the Pareto principle to public sector decision making. *Public Administration Quarterly*, 29(1/2), 59–75.
- Koch, R. (2011). *The 80/20 principle: The secret to achieving more with less* (3rd ed.). Crown Business.
- Kuhaja, T. (2014). Kajian Kelembagaan dalam Pengembangan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 10(3), 278–292.
- Liu, J., Qu, H., & Huang, D. (2023). Economic sustainability assessment of tourism destinations using multidimensional approaches. *Sustainability*, 15(6), 4872.
- Lockwood, M., Davidson, J., Curtis, A., Stratford, E., & Griffith, R. (2010). Governance principles for natural resource management. *Society & Natural Resources*, 23(10), 986–1001.
- Lunariana Lubis, Agus Wahyudi, D. A. (2022). Analisis Keberlanjutan Kelembagaan Ipal Komunal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 6(150), 9–23.
- Mihalic, T. (2024). Trends in sustainable tourism paradigm: Resilience and adaptation. *Sustainability*, 16(17), 7838. <https://doi.org/10.3390/su16177838>
- Morrison, A. M. (2022). Strategic Planning for Tourism Destinations: A Global Perspective. *Tourism Management Journal*, 48(5), 88-99.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.
- Myrovali, G., Tzani, G., & Morfoulaki, M. (2025). Sustainable tourism through digitalization and smart solutions. *Sustainability*, 17(12), 5383. <https://doi.org/10.3390/su17125383>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Pareto, V. (1896). *Cours d'économie politique*. Lausanne: F. Rouge.
- Phadermrod, B., Crowder, R. M., & Wills, G. B. (2019). Importance-performance analysis based SWOT analysis. *International Journal of Information Management*, 44, 194–203. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.03.009>

- Pitcher, T. J., & Preikshot, D. (2001). RAPFISH: A rapid appraisal technique to evaluate the sustainability status of fisheries. *Fisheries Research*, 49(3), 255–270. [https://doi.org/10.1016/S0165-7836\(00\)00205-8](https://doi.org/10.1016/S0165-7836(00)00205-8)
- Pomeroy, R., Ratner, B., Hall, S., Pimoljinda, J., & Vivekanandan, V. (2007). Coping with disaster: Rehabilitating coastal livelihoods and communities. *Marine Policy*, 31(6), 786–793.
- Rasoolimanesh, S. M., et al. (2020). The Role of Community-Based Tourism in Sustainable Development: Insights from Developing Countries. *Tourism Management Perspectives*, 35, 100682.
- Rastegar, R., Higgins-Desbiolles, F., & Ruhanen, L. (2021). COVID-19 and a justice framework to guide tourism recovery. *Annals of Tourism Research*, 91, 103161. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103161>
- Reed, M. S., et al. (2010). What is social learning? *Ecology and Society*, 15(4), 1–10.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). *The competitive destination: A sustainable tourism perspective*. CABI.
- Schiffman, S. S., Reynolds, M. L., & Young, F. W. (1981). *Introduction to multidimensional scaling: Theory, methods, and applications*. Academic Press.
- Sharpley, R. (2009). *Tourism development and the environment: Beyond sustainability?* Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849770255>
- Sharpley, R. (2022). Tourism development and sustainability: Issues of environmental, economic and social equity. *Tourism Management*, 91, 104520. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104520>
- Sidabutar, R. R. (2021). *Ekowisata dalam prespektif ekologi dan konservasi (Cetakan pe)*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Silvia, D., & Muhsoni, F. F. (2024). Analisis status pengelolaan ekowisata di Pulau Gili Labak Sumenep menggunakan metode Rapfish. *Journal of Marine Research*, 13(3), 397–406. <https://doi.org/10.14710/jmr.v13i3.42037>
- Singgalen, Y. A., Nugroho, A. Y. A., Suharsono, & Nantingkaseh, A. H. (2023). Regional tourism development in Pringsewu Regency: Perspective on community-based tourism and sustainable livelihood. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(2). <https://doi.org/10.22500/11202341256>
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : PENERBIT GAVA MEDIA.
- Suryadana, L & Octavia, V. (2020). *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Cetakan Kedua. Bandung : Penerbit Alfabeta.

- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493–504. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>
- UN Tourism. (2021, August 31). What is “sustainable tourism”? <https://en.unwto-ap.org/faq/10712/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009).
- UNEP & UNWTO. (2005). Making tourism more sustainable: A guide for policy makers. Paris & Madrid: United Nations Environment Programme and World Tourism Organization.
- UNEP & UNWTO. (2022). Making tourism more sustainable: A guide for policy makers. Paris–Madrid: UNEP & UNWTO.
- UNEP & UNWTO. (2023). Tourism and Sustainable Development Goals: Journey to 2030.
- UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. UNESCO Publishing.
- UNWTO. (2018). Tourism and Sustainable Development Goals. Madrid: World Tourism Organization.
- UNWTO. (2021, March 8). New guidelines put women’s empowerment at heart of tourism’s restart. <https://www.untourism.int/news/new-guidelines-put-women-s-empowerment-at-heart-of-tourism-s-restart>
- UNWTO. (2023). Sustainable tourism development guidelines. Madrid: World Tourism Organization.
- Urry, J., & Larsen, J. (2021). Mobilities and Sustainability: Tourism in the Digital Era. *Journal of Tourism and Digital Transformation*.
- Vaishar, A., & Štastná, M. (2019). Smart village and sustainability. Southern Moravia case study. *European Countryside*, 11(4), 651–660. <https://doi.org/10.2478/euco-2019-0036>
- Weaver, D. (2024). Sustainable tourism theory and practice revisited. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(2), 215–232.
- Weaver, D. B. (2006). Sustainable tourism: Theory and practice. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
- World Bank. (2003). Local economic development: A primer. Developing and implementing local economic development strategies and action plans. World Bank. [Jika kamu tetap mau “World Bank, 1998”, mohon kirim judul dokumen yang tepat].
- World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford University Press.

- World Tourism Organization. (2022). UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, November 2022 (Vol. 20). <https://doi.org/10.18111/wtobarometereng.2022.20.1.6>
- Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. *Tourism Management*, 31(2), 179–188.
- Yap, Y.-Y., Tan, S.-H., Tan, B.-C., & Tan, S.-K. (2025). Smart tourism technologies and tourist satisfaction: A systematic literature review and research agenda. *Acta Psychologica*, 258, 105191. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105191>
- Zhang, Y., & Deng, B. (2024). Exploring the nexus of smart technologies and sustainable ecotourism: A systematic review. *Heliyon*, 10(11), e31996. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31996>

Regulasi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis Nasional.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.